

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA JAKARTA BARAT

2025



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA JAKARTA BARAT

2025



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA JAKARTA BARAT 2025

iISSN	: -
No Publikasi	: 31740.25017
Katalog	: 4102004.3174
Ukuran Buku	: 29,5 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman	: viii + 108 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Desain Kover	: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Diterbitkan Oleh	: © Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Sumber Ilustrasi	: www.canva.com
Pencetak	: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Muhammad Noval, S.ST, ME

Penanggung Jawab Teknis:

Wanda Pribadi, S.ST

Penyunting:

Wanda Pribadi, S.ST

Penulis:

Resiwati Fajrina Mustiqa Zain, S.ST, M.Stat

Diah Asrianda Puspa Negara, S.Tr.Stat

Tata letak dan Infografis:

Wanda Pribadi, S.ST

Diah Asrianda Puspa Negara, S.Tr.Stat

Gambar Kulit:

Diah Asrianda Puspa Negara, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat 2025 merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Barat. Publikasi ini menyajikan data dan analisis deskriptif ringkas mengenai gambaran umum kesejahteraan rakyat di Kota Jakarta Barat.

Publikasi ini memuat berbagai cakupan pembahasan yang meliputi aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan teknologi informasi, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, serta kemiskinan dan kriminalitas. Pembahasan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan khususnya bagi pemerintah dalam upayanya meningkatkan perekonomian, keadaan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tengah pandemi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.



Jakarta, Desember 2025
Kepala BPS Kota Jakarta Barat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Noval'.

Muhammad Noval, S.ST, M.E

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup	3
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Jenis dan Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 - KEPENDUDUKAN	7
2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk	10
2.2 Status Perkawinan	16
2.3 Kepemilikan Buku Nikah	19
2.4 Kepemilikan Akta Kelahiran	20
BAB 3 - PENDIDIKAN	29
3.1 Buta Huruf	31
3.2 Tingkat Pendidikan	33
3.3 Rata-rata Lama Sekolah	35
3.4 Harapan Lama Sekolah	36
3.5 Pendidikan Pra-sekolah	37



<https://jakbarkota.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten melaksanakan program pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan strategis diarahkan untuk memperkuat kondisi sosial ekonomi warga, sekaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Upaya tersebut selaras dengan visi Pemerintah Provinsi, yaitu mewujudkan “Jakarta sebagai kota maju, lestari, dan berbudaya, dengan warga yang berperan aktif dalam menciptakan keberdayaan, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh penduduknya.”

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, Kota Jakarta kerap menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan Indonesia sekaligus rujukan bagi daerah lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai indikator kinerja pembangunan, sehingga kebijakan yang dirumuskan ke depan dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta memperkuat peran Jakarta sebagai acuan bagi pembangunan di wilayah lain.

Salah satu cara untuk menilai capaian pembangunan adalah melalui analisis terhadap perkembangan indikator kesejahteraan rakyat sebagai sasaran utama berbagai program pembangunan. Peningkatan pada indikator-indikator tersebut umumnya mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai arah yang diharapkan, dan demikian pula sebaliknya. Indikator kesejahteraan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, antara lain tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, kondisi perumahan, serta indikator sosial ekonomi relevan lainnya.

Kesejahteraan rakyat mencakup berbagai dimensi yang luas, sementara ketersediaan data masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, tidak semua aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan dapat dibahas dalam publikasi ini. Uraian yang disajikan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendapatan, perumahan, serta aspek relevan lainnya.



1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat tahun 2025 ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan sosial, sebagai dampak pembangunan yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

1.3. Jenis dan Sumber Data

Publikasi *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat Tahun 2025* menyajikan informasi melalui uraian, tabel, dan ilustrasi grafis. Setiap bab dilengkapi dengan penjelasan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang dibahas. Tabel-tabel yang ditampilkan memuat berbagai indikator dalam bentuk jumlah, persentase, maupun rasio, sehingga pembaca dapat memahami kondisi kesejahteraan secara lebih komprehensif.

Sumber data utama penulisan ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) ditambah data penunjang lainnya yang berasal dari survei dan sumber data lainnya.

a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Kegiatan Susenas secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas dan perumahan serta lingkungan. Karakteristik penting kependudukan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga dan pendidikan dikumpulkan melalui pertanyaan data pokok (kor) setiap tahun. Data yang lebih rinci, seperti konsumsi rumah tangga, perumahan, kesehatan, dan sosial budaya dikumpulkan melalui data sasaran (modul) yang dikumpulkan secara periodik, tiga tahun sekali.



b. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang mencari kerja, dan sebagainya.

c. Sensus Penduduk

Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penduduk dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Sensus penduduk dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sekali, biasanya di tahun yang berakhiran 0, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020. Sensus Penduduk mencakup semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia pada saat pencacahan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali korps diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.


d. Survei Penduduk Antar Sensus

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat dikelompokkan dalam 9 bagian, yaitu: pendahuluan, kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan lingkungan, pendapatan dan pengeluaran, kemiskinan dan indikator lainnya, serta penutup.

Dalam Bab II Kependudukan, membahas sejumlah indikator penting antara lain pertumbuhan dan komposisi penduduk, status dan usia perkawinan, kelahiran dan



kematian, serta pemakaian alat/cara KB. Perubahan-perubahan pada indikator ini mencerminkan kecenderungan atau perubahan yang menyangkut kesejahteraan penduduk.

Bab III Pendidikan, membahas sejumlah indikator penting perkembangan pendidikan yang sering dikaitkan dengan indikator pembentuk kualitas sumber daya manusia.

Bab IV Ketenagakerjaan, membahas struktur ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Informasi yang terangkum di sini meliputi jumlah angkatan kerja, angka pengangguran, dan struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan status pekerjaan. Pengaruh pandemi akibat Covid-19 terhadap penduduk usia kerja ditambahkan ke dalam satu subbag tersendiri.

Bab V Kesehatan, membahas apakah derajat kesehatan masyarakat ibukota sudah baik atau belum, dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan yang akan dibahas di bab ini.

Bab VI Perumahan dan Teknologi Informasi, dalam bab ini akan dibahas beberapa indikator kualitas bahan bangunan rumah serta fasilitas yang digunakan serta penguasaan HP dan akses internet sebagai indikator pemanfaat teknologi.

Bab VII Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga, bab ini akan membahas aspek pendapatan, tingkat konsumsi rumah tangga dan pola konsumsi masyarakat.

Bab VIII Kemiskinan dan Indikator Lainnya akan membahas tingkat kemiskinan ibukota dan indikator lainnya.

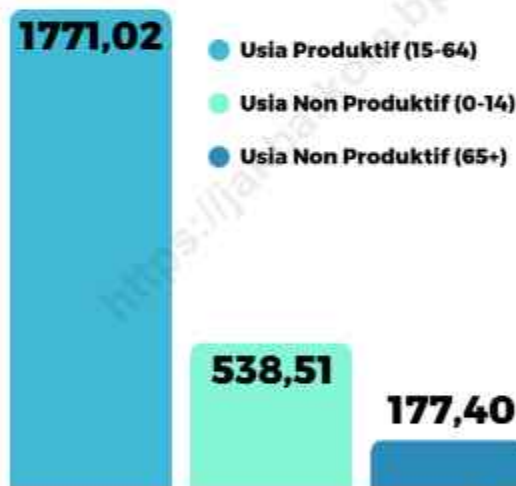
Sedangkan Bab IX Penutup, merupakan ringkasan ataupun *highlight* beberapa indikator terpilih serta dampak pandemi COVID-19 terhadap beberapa indikator.

JUMLAH PENDUDUK KOTA JAKARTA BARAT tahun 2025

2,48 juta jiwa



Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur (ribu jiwa)



2

Sex Ratio → 100,85
Dependency Ratio → 40,42

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2025 Hasil SP2020

KEPENDUDUKAN

BAB II

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan unsur utama dalam pembangunan, karena selain berperan sebagai pelaksana berbagai program, masyarakat juga menjadi pihak yang merasakan langsung hasil pembangunan. Oleh sebab itu, ketersediaan data kependudukan yang lengkap dan akurat sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan. Data tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga memuat perkembangan dari waktu ke waktu serta proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang.

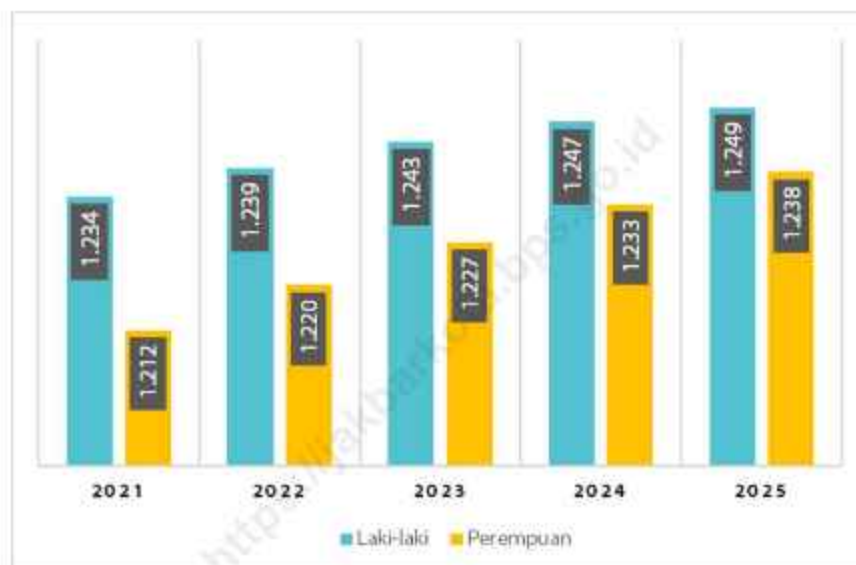
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyediakan data resmi, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain melalui penyusunan proyeksi penduduk yang bersumber dari Sensus Penduduk (SP) dan pengumpulan informasi melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Kota Jakarta Barat sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta, memiliki karakteristik unik sebagai wilayah metropolitan dengan warisan sejarah yang masih terjaga. Kombinasi bangunan bersejarah dan perkembangan kawasan modern menjadikan wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan melebihi 2,48 juta jiwa pada tahun 2025, Jakarta Barat menjadi aset penting sekaligus tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di ibu kota.

Namun demikian, pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola dengan baik dapat memunculkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan hunian. Ketidakeimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas penyediaan pangan berpotensi menyebabkan kerawanan, sementara keterbatasan permukiman dapat mendorong munculnya kawasan kumuh. Oleh karena itu, perencanaan kependudukan yang berbasis data akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan proyeksi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,48 juta jiwa, yang menempati wilayah seluas 129,54 km². Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki tercatat lebih banyak sekitar 10 ribu jiwa dibandingkan penduduk perempuan. Pola ketimpangan jumlah penduduk menurut jenis kelamin ini konsisten selama lima tahun terakhir, di mana jumlah penduduk laki-laki terus mencatatkan angka yang lebih tinggi daripada perempuan.



Sumber: Badan Pusat Statistik - Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Kota Jakarta Barat Menurut Jenis Kelamin (ribu jiwa), 2021-2025

Kota Jakarta Barat merupakan satu-satunya kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang masih memiliki proporsi penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dalam lima tahun terakhir, komposisi penduduk di wilayah ini secara konsisten didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, sebanyak 50,21 persen penduduk Jakarta Barat merupakan laki-laki, sementara 49,79 persen sisanya adalah penduduk perempuan.

2.1.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Menurut data Semester I tahun 2025 yang dihimpun oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Jakarta Barat mencapai 2,55 juta jiwa dan menempati wilayah seluas 129,54 km². Penduduk tersebut tersebar di 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Cengkareng dengan 582.039 jiwa atau 22,80 persen dari total penduduk, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Taman Sari dengan 122.254 jiwa atau 4,79 persen.

Sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Luas wilayah yang relatif terbatas serta jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya berkontribusi terhadap naiknya tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat tercatat mencapai 19.710 jiwa per km².



Sumber: Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Semester I Tahun 2025, diolah

Gambar 2.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Barat, Semester 1 tahun 2025 (Jiwa/Km²)

Peningkatan kepadatan penduduk di Kota Jakarta Barat terjadi di seluruh kecamatan tanpa terkecuali. Pada tahun 2025, kecamatan dengan tingkat kepadatan



tertinggi adalah Kecamatan Tambora yang mencapai 47.521 jiwa per km². Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Media Indonesia, wilayah ini bahkan masih tercatat sebagai kecamatan terpadat di kawasan Asia Tenggara.

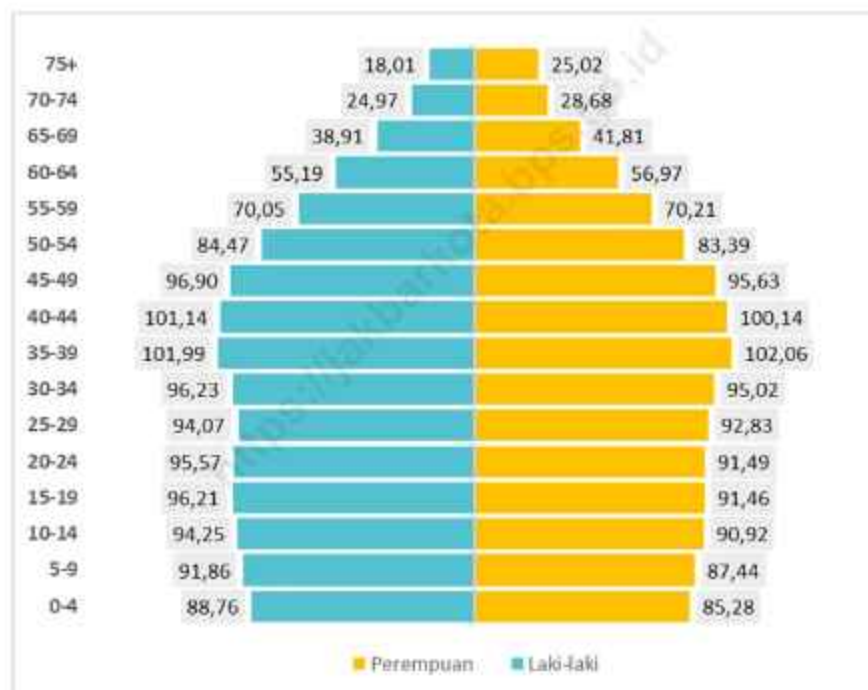
Sebaliknya, pola kepadatan yang lebih rendah relatif konsisten terjadi di Kecamatan Kembangan, yang memiliki luas 24,16 km² dan menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di Jakarta Barat pada 2025. Menariknya, kepadatan tertinggi tidak muncul pada kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar. Meskipun Kecamatan Cengkareng memiliki jumlah penduduk terbanyak, luas wilayahnya yang mencapai 26,54 km² menyebabkan tingkat kepadatan wilayah tersebut tercatat sebesar 21.931 jiwa per km², bahkan tidak mencapai separuh dari kepadatan yang terjadi di Kecamatan Tambora.

2.1.2. Komposisi Penduduk

Perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya angka rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan sendiri merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia belum produktif (0–14 tahun) dan usia tidak lagi produktif (65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Tinggi rendahnya rasio ini mencerminkan tingkat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus dipikul kelompok usia produktif, sehingga dapat memengaruhi efektivitas dan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

Berdasarkan piramida penduduk, dapat diketahui bahwa Kota Jakarta Barat pada tahun 2025 didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai 1,77 juta jiwa atau 71,21 persen dari total penduduk. Sementara itu, penduduk usia belum produktif (0–14 tahun) mencakup 21,65 persen, dan penduduk usia tidak lagi produktif (65 tahun ke atas) sebesar 7,13 persen. Peningkatan proporsi penduduk lanjut usia dari 6,31 persen pada tahun 2024 menjadi 7,13 persen pada tahun 2025 menunjukkan bertambahnya komposisi kelompok lansia di wilayah ini. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya proses penuaan penduduk (*population ageing*), yang dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi kebutuhan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kelompok lanjut usia.

Berdasarkan *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020–2035* yang bersumber dari hasil Sensus Penduduk 2020, angka ketergantungan di Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 40,42 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 40 hingga 41 penduduk usia non-produktif, yaitu kelompok usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas. Proporsi tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 40,04 persen. Meskipun demikian, rasio yang masih berada di bawah 50 persen menunjukkan bahwa Jakarta Barat masih berada dalam periode *bonus demografi*, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.




Sumber: Badan Pusat Statistik - *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020*

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Jakarta Barat (ribu jiwa), 2025

2.1.3. Rasio Jenis Kelamin

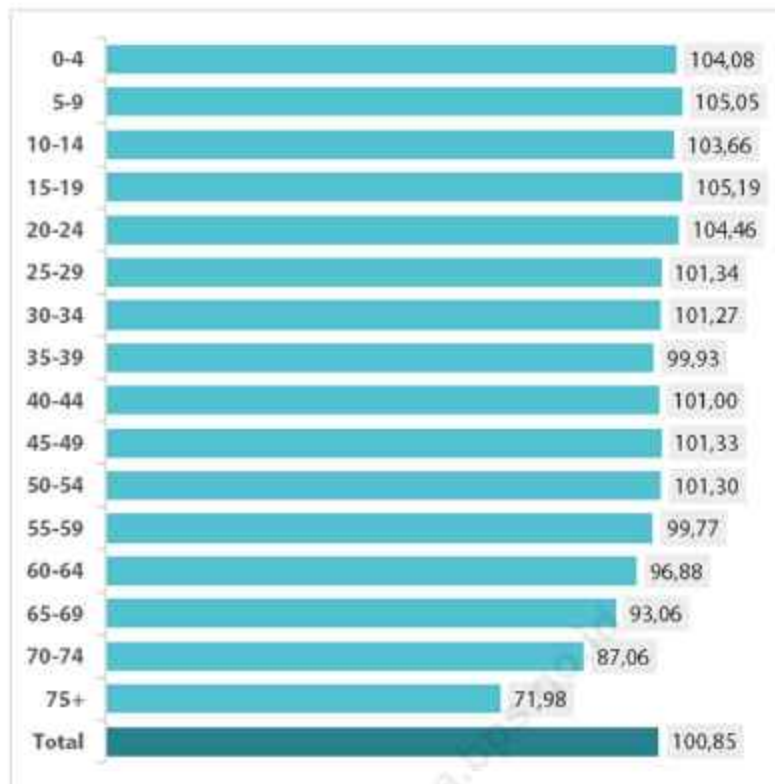
Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Angka ini dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan



di suatu daerah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin dapat pula dihitung untuk masing-masing kelompok umur.

Melalui proses demografi, penduduk laki-laki biasanya lebih rentan dalam hal tingkat kesehatan. Penduduk laki-laki memiliki angka harapan hidup yang relatif lebih rendah dari pada angka harapan hidup penduduk perempuan. Di sisi lain penduduk laki-laki memiliki tingkat mobilitas yang lebih tinggi dari pada penduduk perempuan yang menyebabkan risiko terhadap kecelakaan, risiko dalam melakukan aktivitas relatif lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan aktivitasnya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja/mencari pekerjaan di tempat lain.

Berdasarkan angka proyeksi tercatat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Jakarta Barat pada tahun 2025 mencapai 100,85 persen, menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 101,34 persen. Angka tersebut yang bernilai lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan perempuan. Pada tahun 2025, rasio jenis kelamin pada kelompok umur 5-9 tahun tercatat nilai rasio 105,05. Artinya, jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Kelimpahan penduduk laki-laki pada usia muda berarti bahwa ketika kohort ini memasuki usia produktif, Jakarta Barat akan mengalami lonjakan angkatan kerja laki-laki. Hal ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai, khususnya di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki seperti konstruksi, logistik, transportasi, industri kreatif teknis, maupun pekerjaan berisiko tinggi yang secara tradisional didominasi laki-laki. Jika kebutuhan ini tidak terantisipasi, peningkatan angka pengangguran laki-laki dapat terjadi, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial-ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik - Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

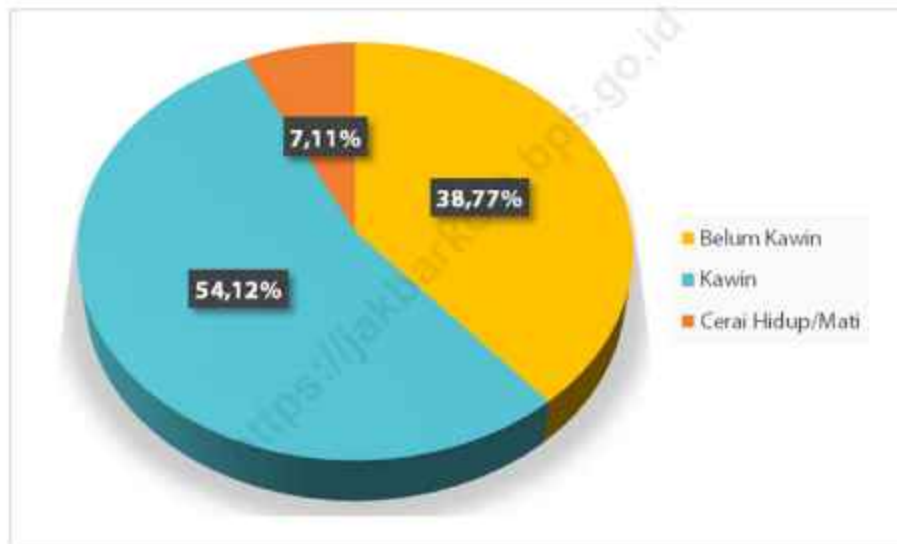
Gambar 2.4 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kelompok Usia di Kota Jakarta Barat (persen), 2025

Dari Gambar 2.4, tampak bahwa terdapat beberapa kelompok umur yang memiliki rasio jenis kelamin dibawah 100. Kelompok umur tersebut berada di rentang usia 35-39 tahun dan usia lebih dari 55 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak di usia tua. Hal ini dapat dikatakan merupakan konsekuensi dari ketahanan hidup laki-laki yang lebih rendah dari pada perempuan (yang dapat tercermin dari harapan hidup antara laki-laki dan perempuan), serta faktor risiko yang lebih besar dialami laki-laki sepanjang siklus hidupnya.

Jika tren menurunnya *sex ratio* pada kelompok usia lanjut terus berlanjut, maka Jakarta Barat perlu melakukan penyesuaian dalam kebijakan pembangunan manusia, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan sarana prasarana lansia: Perluasan akses jaminan sosial lansia, termasuk bantuan sosial yang diarahkan untuk perempuan lanjut usia; dan Penyediaan program pemberdayaan lansia perempuan, mengingat mereka kelompok dominan dalam struktur penduduk lanjut usia.

2.2 Status Perkawinan

Komposisi penduduk menurut status perkawinan dan kelompok umur sangat penting untuk diketahui, karena hal ini terkait dengan masalah fertilitas, usia perkawinan pertama untuk perempuan dan masa reproduksinya, serta rata-rata anak lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak masih hidup (AMH). Pengumpulan data fertilitas diperoleh dari perempuan pernah kawin (kawin, cerai mati, dan cerai hidup) dengan pertimbangan kejadian kelahiran di Kota Jakarta Barat biasanya terjadi pada ikatan perkawinan, sehingga kejadian kelahiran pada perempuan yang belum kawin tetap diperhitungkan sebagai faktor penentu angka fertilitas. Wanita belum kawin tetapi pernah melahirkan dimasukkan dalam kelompok cerai hidup.

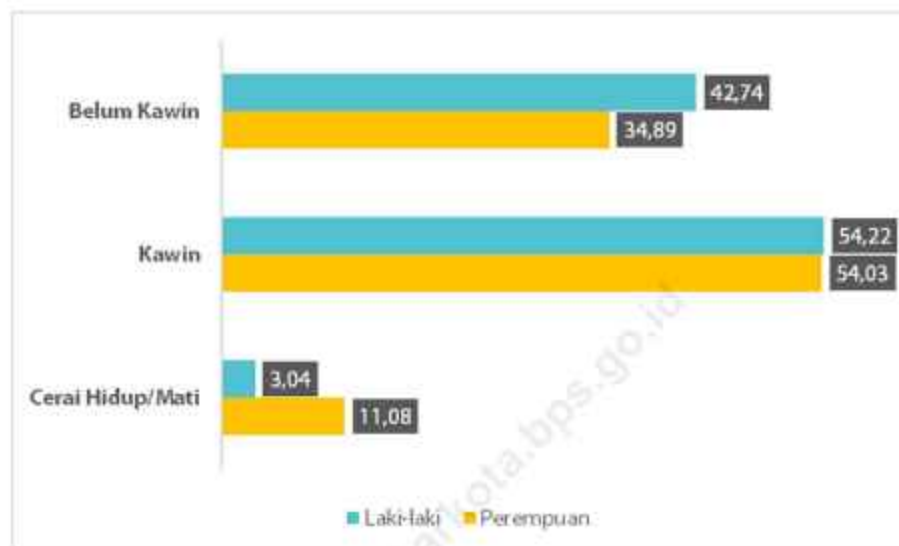


Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS, 2025

Gambar 2.5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan di Kota Jakarta Barat, 2025

Secara umum, persentase penduduk di Kota Jakarta Barat berumur di atas 10 tahun didominasi oleh penduduk yang sudah kawin yaitu sebesar 54,12 persen. Adapun proporsi penduduk Kota Jakarta Barat yang belum kawin mencapai 38,77 persen, yang dapat digolongkan tinggi. Besarnya proporsi penduduk yang belum kawin, sejalan dengan besarnya proporsi penduduk usia muda sebagaimana terlihat pada struktur piramida penduduk Kota Jakarta Barat.

Pada kategori cerai hidup dan cerai mati, tercatat bahwa sebesar 7,11 persen penduduk Kota Jakarta Barat berada pada status ini. Meskipun proporsinya relatif kecil, kelompok ini tetap memerlukan perhatian dalam kebijakan sosial karena berpotensi menghadapi kerentanan ekonomi dan sosial, terutama bagi kepala keluarga tunggal dan lansia.



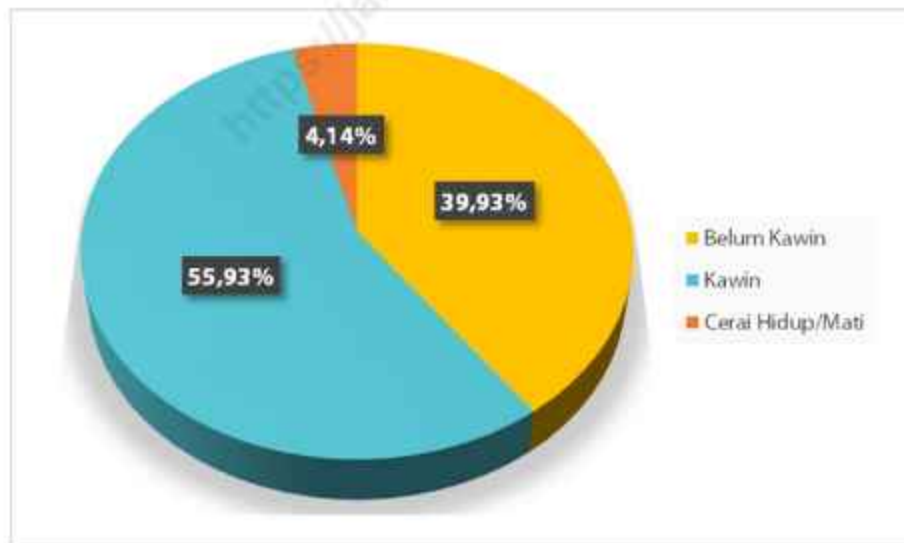
Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS, 2025

Gambar 2.6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat Tahun, 2025 (persen)

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2025 memberikan gambaran proporsi penduduk laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati). Proporsi penduduk berstatus kawin masih mendominasi baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk berstatus kawin mendominasi pada kedua jenis kelamin, yaitu 54,22 persen pada laki-laki dan 54,03 persen pada perempuan. Sementara itu, penduduk berstatus belum kawin yang lebih banyak berasal dari laki-laki (42,74 persen) dibanding perempuan (34,89 persen), mengindikasikan bahwa laki-laki cenderung memasuki usia perkawinan yang lebih lambat. Pada status cerai hidup dan cerai mati, persentase perempuan (11,08 persen) jauh lebih tinggi dibanding laki-laki (3,04 persen), mencerminkan kecenderungan perempuan lebih rentan menjadi kepala keluarga

tunggal, baik akibat perceraian maupun kematian pasangan. Perbedaan pola ini memberikan gambaran mengenai dinamika keluarga dan potensi kebutuhan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di Jakarta Barat. Hal ini juga dapat menjadi rambu-rambu bagi pemerintah untuk menindaklanjuti potensi KRT tunggal bagi perempuan.

Analisis lebih lanjut dapat dilihat dari komposisi penduduk perempuan usia 15 hingga 49 tahun menurut status perkawinan, yaitu kelompok usia yang merupakan fase aktif dalam siklus reproduksi. Gambar 2.7 menunjukkan bahwa 39,93 persen perempuan usia reproduktif di Jakarta Barat berstatus belum kawin. Proporsi ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pola umum negara berkembang, di mana mayoritas perempuan pada usia tersebut telah memasuki perkawinan. Berdasarkan *Life Course Theory*, fase 15 hingga 49 tahun biasanya ditandai dengan transisi untuk memulai membangun keluarga, namun meningkatnya kelompok yang belum menikah mengindikasikan terjadinya penundaan usia kawin. Fenomena ini mencerminkan dinamika demografi wilayah urban dan menjadi penanda berlangsungnya transisi demografi menuju pola fertilitas yang lebih rendah dalam beberapa tahun ke depan.

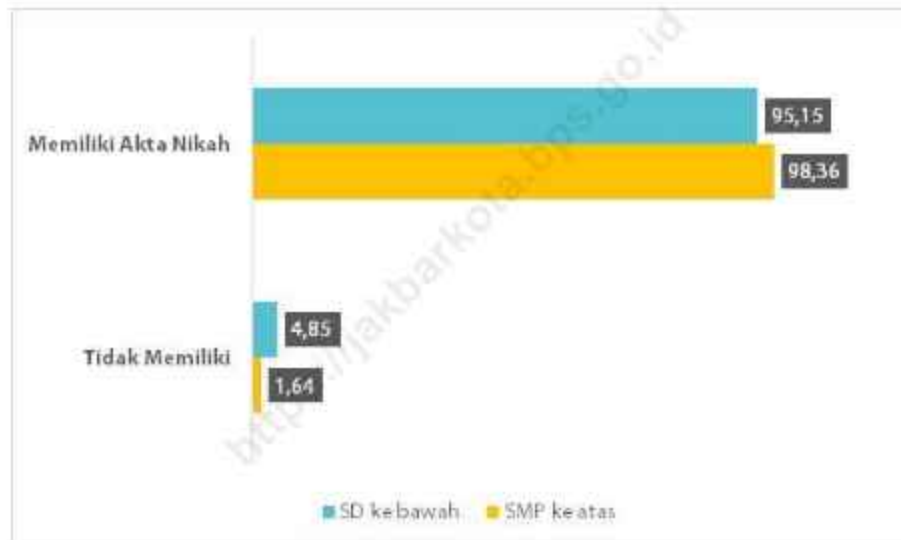


Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS, 2025

Gambar 2.7 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan di Kota Jakarta Barat, 2025 (persen)

2.3 Kepemilikan Buku Nikah

Akta Nikah adalah alat atau bukti otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pria dan wanita yang melakukan pencatatan perkawinan. Kepemilikan akta nikah yang menjadi indikator formal dalam perkembangan sosial masyarakat, sangat penting untuk dianalisis karena memberikan gambaran legitimasi rumah tangga, baik pada generasi terkait maupun generasi penerus selanjutnya. Dengan kata lain, akta nikah menunjukkan bahwa pasangan dapat diakui negara sebagai unit keluarga resmi dan berhak mengakses layanan, sarana, dan prasarana publik. Sebaliknya, tingginya komposisi penduduk yang belum memiliki akta nikah dapat diartikan sebagai terbatasnya akses pelayanan publik yang dapat dinikmati,



Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS, 2025

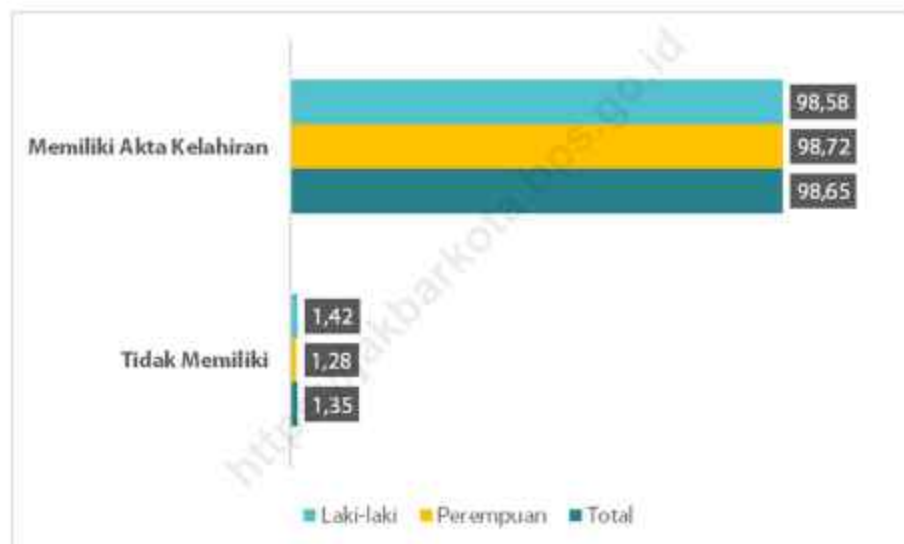
Gambar 2.8 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas berstatus kawin menurut tingkat pendidikan dan kepemilikan buku/akta nikah, 2025 (persen)

Gambar 2.8 menunjukkan kondisi kepemilikan akta nikah yang berbeda antara penduduk berusia 10 tahun dengan status kawin menurut tingkat pendidikan. Penduduk dengan pendidikan lebih rendah (SD ke bawah) memiliki proporsi tidak memiliki akta nikah yang lebih besar, yaitu 4,85 persen, sementara penduduk dengan pendidikan SMP ke atas jauh lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses terhadap layanan

administrasi pernikahan, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan perkawinannya tercatat secara resmi oleh negara.

2.4 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Akta Kelahiran nantinya akan sangat berguna di masa depan dalam mengurus berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan lain-lain.



Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS, 2025

Gambar 2.9 Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat menurut Jenis Kelamin, 2025 (persen)

Dari gambar 2.9 menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 0 sampai dengan 17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 98,65 persen dan 1,35 persen lain tidak memiliki akta kelahiran. Adapun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan untuk kepemilikan akta kelahiran. Namun, walaupun persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran sudah lebih dari 98 persen (administrasi pencatatan kelahiran di Jakarta Barat sudah



berjalan sangat baik dan relatif merata), pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada penduduk yang masih belum memiliki akta kelahiran.

Akta kelahiran menjadi dokumen resmi yang membuka berbagai akses pelayanan infrastruktur dan administrasi, terutama akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Akta kelahiran dibutuhkan calon siswa maupun mahasiswa untuk kepentingan pendidikan karena seluruh sekolah telah mewajibkan pemenuhan dokumen tersebut, mulai dari pendaftaran, ujian nasional, hingga ijazah (surat keterangan lulus). Dalam akses lain yaitu kesehatan, akta kelahiran dibutuhkan untuk menjadikan penduduk sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam hal memperluas akses layanan kesehatan preventif maupun kuratif. Selanjutnya, akta kelahiran juga dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran PIP (Program Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Pangan, serta jaminan sosial lainnya. Oleh karena itu, tidak memiliki akta kelahiran membuat anak berada dalam posisi sangat rentan karena tidak tercatat secara resmi oleh negara. Akta kelahiran bukan hanya dokumen administratif, tetapi fondasi akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, identitas hukum, dan perlindungan sosial.

<https://jakbar.go.id>

Tabel 2.1
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia
Produktif dan Non Produktif di Kota Jakarta Barat, 2025

No	Kelompok Umur (tahun)	2025	
		Jumlah (ribu jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Usia Produktif (15-64)	1.771,02	71,21
2.	Usia Non Produktif		
	Usia bayi-Remaja (0-14)	538,51	21,65
	Usia Tua (65+)	177,4	7,13
	Total	2.487,20	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik - Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.2
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2021-2025

Jenis Kelamin	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	(jiwa)	1234,27	1238,95	1243,25	1.246,57	1.248,88
	(%)	50,45%	50,39%	50,33%	50,27%	50,21%
Perempuan	(jiwa)	1212,42	1219,76	1226,8	1233	1.238,32
	(%)	49,55%	49,61%	49,67%	49,73%	49,79%
Jakarta Barat	(jiwa)	2446,69	2458,71	2470,05	2.479,57	2.487,20
	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil SP2020

Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Barat, 2025

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)	Jiwa (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kembangan</i>	24,16	12.862	310.741
<i>Kebon Jeruk</i>	17,98	20.137	362.061
<i>Palmerah</i>	7,51	29.971	225.081
<i>Grogol Petamburan</i>	9,99	22.913	228.896
<i>Tambora</i>	5,4	47.521	256.614
<i>Taman Sari</i>	7,73	15.816	122.254
<i>Cengkareng</i>	26,54	21.931	582.039
<i>Kalideres</i>	30,23	15.399	465.502
Jakarta Barat	129,54	19.710	2.553.188

Sumber : Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, 2025

Tabel 2.4
 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 di Kota Jakarta Barat (persen), 2025

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	7,11	6,89	7,00
5-9	7,36	7,06	7,21
10-14	7,55	7,34	7,45
15-19	7,71	7,39	7,55
20-24	7,65	7,39	7,52
25-29	7,53	7,50	7,52
30-34	7,71	7,67	7,69
35-39	8,17	8,24	8,20
40-44	8,10	8,09	8,09
45-49	7,76	7,72	7,74
50-54	6,77	6,73	6,75
55-59	5,61	5,67	5,64
60-64	4,42	4,60	4,51
65-69	3,12	3,38	3,25
70-74	2,00	2,32	2,16
75+	1,44	2,02	1,73
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik - Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.5
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur
di Kota Jakarta Barat, 2025

Golongan Umur	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)
0-4	104,08
5-9	105,05
10-14	103,66
15-19	105,19
20-24	104,46
25-29	101,34
30-34	101,27
35-39	99,93
40-44	101,00
45-49	101,33
50-54	101,30
55-59	99,77
60-64	96,88
65-69	93,06
70-74	87,06
75+	71,98
Total	100,85

Sumber: Badan Pusat Statistik - Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Angka Ketergantungan di Kota Jakarta Barat, 2025

Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
0-14	538,51	21,65%
15-64	1.771,02	71,21%
65+	177,40	7,13%
Total	2.470.780	100,00
Dependency Ratio	40,42	

Sumber: Badan Pusat Statistik - Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.7

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kota Jakarta Barat (persen), 2025

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan		Total
	Laki-laki	Perempuan	40% bawah	40% tengah	20% atas	SD ke bawah	SMP ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Belum Kawin	42,74	34,89	41,07	39,37	33,59	79,29	27,95	38,77
Kawin	54,22	54,03	53,73	53,59	55,85	15,75	64,37	54,12
Cerai Hidup/ Mati	3,04	11,08	5,20	7,04	10,56	4,96	7,68	7,11
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik – SUSENAS, 2025

Tabel 2.8

Persentase Penduduk Usia 15–49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kota Jakarta Barat (persen), 2025

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan		Total
	Laki-laki	Perempuan	40% bawah	40% tengah	20% atas	SD ke bawah	SMP ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Belum Kawin	50,76	39,93	42,29	47,45	46,77	84,83	36,31	45,29
Kawin	48,22	55,92	55,94	49,92	49,02	14,65	60,62	52,11
Cerai Hidup/ Mati	1,02	4,14	1,77	2,63	4,22	0,51	3,07	2,60
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik – SUSENAS, 2025

Tabel 2.9
 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Berstatus Kawin menurut Karakteristik dan Kepemilikan Buku/Akta Nikah, 2025 (persen)

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan		Total
	Laki-laki	Perempuan	40% bawah	40% tengah	20% atas	SD ke bawah	SMP ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Memiliki	98,08	98,24	97,18	98,07	99,99	95,15	98,36	98,16
Tidak Memiliki	1,92	1,76	2,82	1,93	0,01	4,85	1,64	1,84
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik – SUSENAS, 2025

Tabel 2.10
 Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang Memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, 2025 (persen)

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan		Total
	Laki-laki	Perempuan	40% bawah	40% tengah	20% atas	SD ke bawah	SMP ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Memiliki	98,58	98,72	98,94	99,32	95,73	100,00	98,58	98,65
Tidak Memiliki	1,42	1,28	1,06	0,68	4,27	0,00	1,42	1,35
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik – SUSENAS, 2025

**ANGKA BUTA HURUF
KOTA JAKARTA BARAT, 2025**

0,48 persen (%)



**Komposisi Penduduk Usia
15 Tahun ke Atas menurut
Tingkat Pendidikan Terakhir (%)**

- SD ke bawah
- SMP sederajat
- SMA sederajat
- Perguruan Tinggi



3

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas didominasi oleh lulusan SMA sederajat (44,71 %). Masih terdapat 17,11% penduduk yang merupakan lulusan SD ke bawah.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - BPS

PENDIDIKAN

BAB III

PENDIDIKAN

Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pembangunan sektor pendidikan perlu mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat agar mampu membentuk sumber daya manusia yang siap terhadap perkembangan zaman. SDM yang berkualitas pada akhirnya akan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global.

Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis. Program wajib belajar 6 tahun yang dimulai sejak 1984 kemudian diperluas menjadi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada 1994. Dalam rentang waktu sekitar dua dekade, program tersebut terbukti memberikan dampak positif berupa penurunan angka buta huruf serta peningkatan angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang.

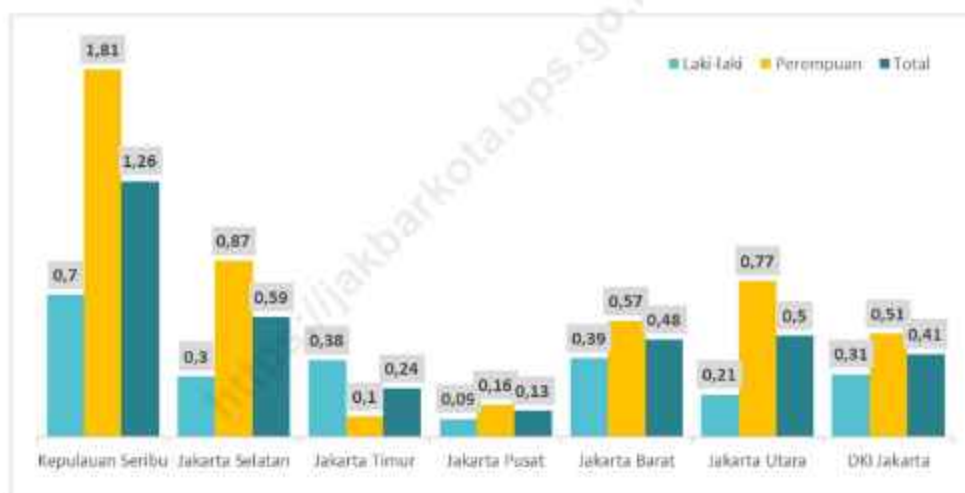
Di tingkat daerah, sejak 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Melalui kebijakan ini, siswa SMA dan sederajat memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan, yang diikuti dengan pemberlakuan SPP gratis untuk seluruh jenjang sekolah negeri, mulai dari SD hingga SMA.

Berbagai kebijakan tersebut berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan akses pendidikan turut mendorong penundaan usia masuk kerja di kalangan remaja. Dengan pemerataan pendidikan yang semakin baik, diharapkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

3.1 Buta Huruf

Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk secara umum. Tingkat buta huruf adalah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk yang tidak mampu membaca dan menulis terhadap jumlah seluruh penduduk.


Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki setiap individu. Indikator ini membantu mengidentifikasi kelompok penduduk yang tertinggal secara pendidikan, baik berdasarkan jenis kelamin maupun wilayah. Berkaitan dengan ini, pemerintah berusaha agar seluruh penduduk bebas buta aksara. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan dan mencanangkan program Wajib Belajar 13 Tahun yang diperluas dari semula 12 tahun (yang mencakup SD sampai SMA), yang kemudian memasukkan *pendidikan anak usia dini (PAUD/TK)* sebagai bagian awal program tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari peta jalan pendidikan nasional dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029* serta sedang dalam proses perancangan implementasi.



Sumber : BPS, Susenas Maret 2025

Gambar 3.1 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2025 (persen)

Angka buta huruf (ABH) yang dihitung oleh BPS adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Jakarta Barat yang belum mampu baca tulis per total penduduk usia tersebut. Secara umum, ABH seluruh wilayah di provinsi DKI Jakarta cenderung berada di bawah 1 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian, Kota Jakarta Barat masih menempati peringkat keempat dengan ABH yang tercatat sebesar 0,48 persen. ABH terendah berada pada wilayah Kota Jakarta Pusat, yaitu sebesar 0,13 persen, diikuti Kota Jakarta Timur sebesar 0,24 persen.



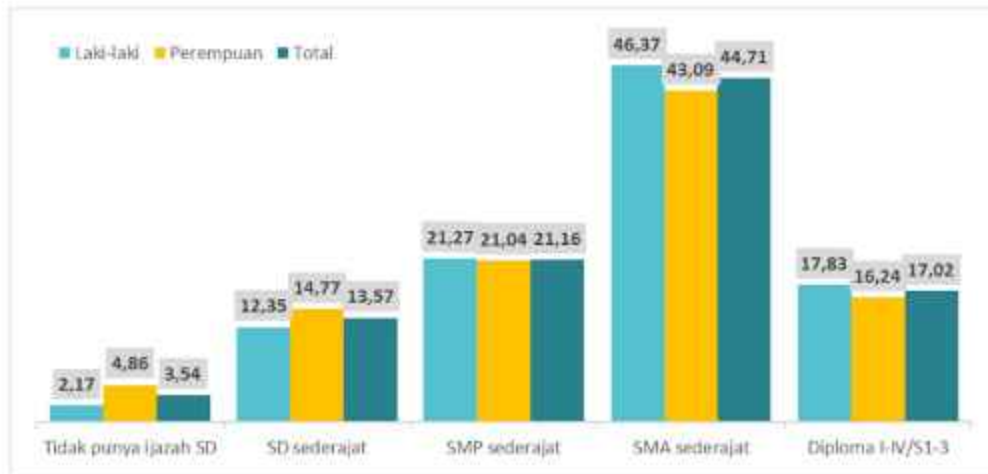
Apabila dilihat lebih dalam berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan baca tulis. ABH Kota Jakarta Barat untuk jenis kelamin perempuan bernilai 0,57 persen, lebih besar dibandingkan laki-laki sebesar 0,39 persen. Sementara itu, Kota Jakarta Timur tercatat memiliki ABH perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Fenomena ini dapat mengindikasikan kondisi pendidikan sebaliknya yang ada di Jakarta Timur, bahwa akses pendidikan sudah menyeluruh untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu untuk melakukan intervensi kebijakan agar ABH di setiap wilayah kabupaten dan kota mendekati nol.

Salah satu hal yang turut berperan meningkatkan kemampuan baca tulis adalah tidak hanya mengencangkan pendidikan formal, akan tetapi dapat melalui program pendidikan non formal dengan diberlakukannya program Paket A, Paket B, SMP Terbuka, dan program penuntasan keniraksaraan lainnya. Kemudian, berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti pemberian “Bantuan Operasional Sekolah” (BOS), “Bantuan Operasional Pendidikan” (BOP), Beasiswa untuk siswa miskin (BSM), dan program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bertujuan membantu siswa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah seperti membeli buku, pakaian seragam, dan uang saku/transpor.

3.2 Tingkat Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan produktivitas seseorang dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada tahun 2025, penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Jakarta Barat yang mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA/ sederajat (termasuk SMK) adalah sebesar 44,71 persen, tingkat SMP/ sederajat sebesar 21,16 persen, tingkat diploma I-IV dan strata 1-3 sebesar 17,02 persen, tingkat SD/ sederajat sebesar 13,57 persen, dan tidak punya ijazah SD sebesar 3,54 persen.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2025

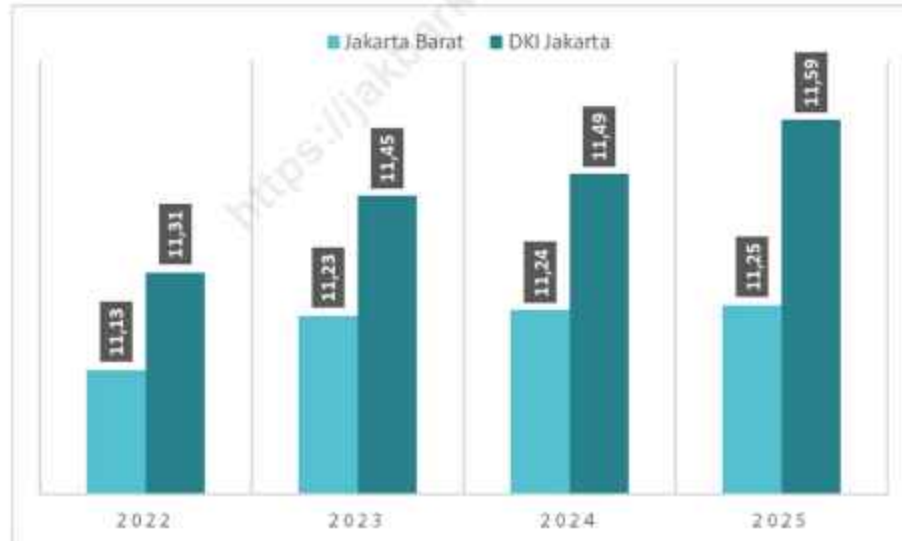
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2025 (Persen)

Gambar 3.4 menunjukkan komposisi penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi yang didapatkan. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2025 terdapat kecenderungan bahwa penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, yakni jenjang SMA/ perguruan dan Perguruan Tinggi (Diploma I-IV/S1-3), yaitu masing-masing sebesar 46,37 dan 17,83 persen. Sementara, persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang menamatkan SMP sederajat ke bawah, lebih dominan dibandingkan laki-laki. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa kesenjangan gender masih terlihat pada akses dan keberlanjutan pendidikan ke jenjang tinggi. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa meskipun capaian pendidikan menengah sudah dominan, ketimpangan gender masih muncul pada pendidikan dasar ke bawah dan pendidikan tinggi, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong pemerataan kesempatan pendidikan.

3.3 Rata-rata Lama Sekolah

Ada dua indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk yang sekaligus digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Secara umum RLS penduduk di Kota Jakarta Barat, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, RLS Kota Jakarta Barat adalah sebesar 11,25 tahun, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang sebesar 11,24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Jakarta Barat usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,25 tahun atau termasuk dalam kelas XII (kelas III SMA). Peningkatan ini sejalan dengan RLS Provinsi DKI Jakarta yang juga mengalami peningkatan, yakni menjadi 11,59 tahun atau termasuk kelas XII (Kelas III SMA) pada tahun 2025.



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

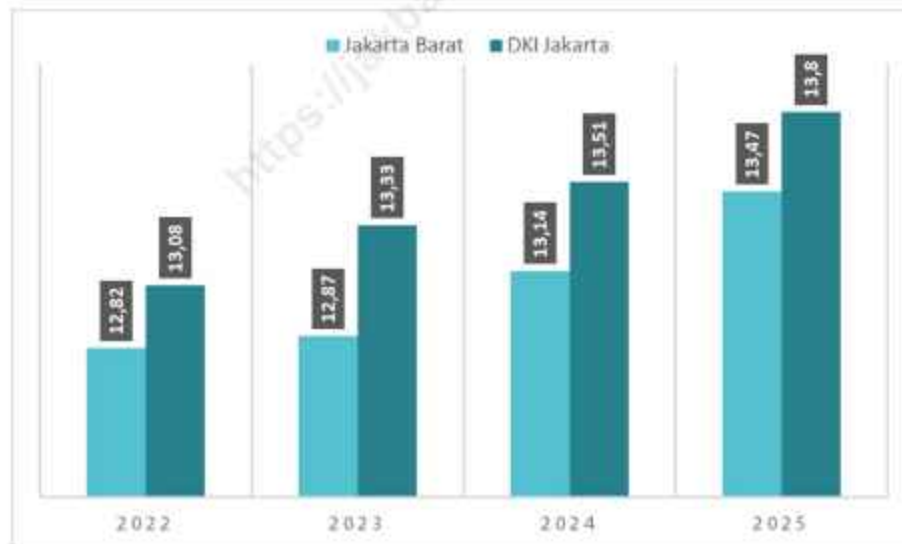
Gambar 3.3 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Barat, 2022-2025 (persen)

3.4 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2025, HLS Kota Jakarta Barat tercatat sebesar 13,47 tahun naik 0,33 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 13,47 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma II.

Sejalan dengan hal tersebut, HLS Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan, yakni mencapai 13,8 tahun pada tahun 2025, yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 13,8 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma II.



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

Gambar 3.4 Harapan Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Barat, 2022-2025 (persen)


3.5 Pendidikan Prasekolah

Seperti yang telah dibahas pada sub Bab sebelumnya, kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan layanan pendidikan yang berkesinambungan sejak pendidikan prasekolah hingga pendidikan menengah. Pendidikan prasekolah memegang peranan penting karena menjadi tahap awal pembentukan kemampuan belajar, karakter, serta kesiapan anak dalam mengikuti proses pendidikan formal, yang berpengaruh secara jangka panjang terhadap prestasi akademik dan keberhasilan pendidikan selanjutnya. Oleh sebab itu, analisis keikutsertaan anak dalam pendidikan prasekolah diperlukan untuk memetakan partisipasi penduduk dalam pendidikan usia dini berdasarkan karakteristik rumah tangga, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar perumusan intervensi yang lebih tepat sasaran guna memperluas akses PAUD yang berkualitas, menekan ketimpangan pendidikan sejak dini, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2025

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun di menurut Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Barat, 2024-2025



Pendidikan prasekolah yang dapat diikuti oleh penduduk usia dini (0-6 tahun) adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan lainnya. Berdasarkan gambar 3.5 di atas, penduduk usia dini masih cenderung didominasi oleh kategori tidak atau belum pernah mengikuti prasekolah, baik di Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2025, kurang dari separuh penduduk usia dini yang masih dan pernah mengikuti pendidikan prasekolah di tahun ajaran sebelumnya. Namun begitu, persentase penduduk usia dini yang masih dan pernah mengikuti prasekolah, meningkat di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana masing-masing sebesar 25,68 dan 4,54 persen. Walaupun pola ini mengindikasikan adanya perbaikan partisipasi prasekolah, namun cakupannya masih terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan akses, sosialisasi, dan kebijakan afirmatif pendidikan prasekolah sebagai bagian dari implementasi Wajib Belajar 13 Tahun.

Tabel 3.1
 Persentase Penduduk 15 tahun ke atas menurut Karakteristik dan Kemampuan membaca dan menulis Huruf Latin (Angka Buta Huruf), 2025

Kemampuan Baca/Tulis	Jenis Kelamin		Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Total
	Laki-laki	Perempuan	40% bawah	40% tengah	20% atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bisa baca/tulis	99,61	99,43	99,74	99,08	100	99,52
Tidak bisa baca/tulis	0,39	0,57	0,26	0,92	0	0,48
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Susenas Maret 2025

Tabel 3.2
 Angka Buta Huruf Penduduk 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2025 (persen)

Kemampuan Baca/Tulis	2023			2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jakarta Barat	0,88	1,39	1,14	0,44	0,99	0,72	0,39	0,57	0,48
DKI Jakarta	0,43	0,71	0,58	0,22	0,66	0,45	0,31	0,51	0,41

Sumber: BPS, Susenas Maret 2025

Tabel 3.3

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Jakarta Barat, 2023-2025 (persen)

Usia Sekolah/ Jenis Kelamin	2023		2024		2025	
	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jakarta Barat	DKI Jakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/belum punya ijazah SD						
Laki-laki	2,86	2,83	4,18	2,55	2,17	1,87
Perempuan	3,84	4,06	6,13	4,07	4,86	3,53
Total	3,36	3,46	5,17	3,32	3,54	2,72
SD/ sederajat						
Laki-laki	10,57	9,54	11,68	9,39	12,35	10,3
Perempuan	14,97	12,13	15,13	12,78	14,77	13,49
Total	12,80	10,86	13,42	11,11	13,57	11,92
SMP/ sederajat						
Laki-laki	17,98	17,77	17,84	17,14	21,27	18,59
Perempuan	21,54	19,16	17,14	19,49	21,04	18,80
Total	19,79	18,48	19,09	18,34	21,26	18,70
SMA/SMK/ sederajat						
Laki-laki	50,44	51,80	50,90	52,41	46,37	48,59
Perempuan	44,13	46,65	44,53	45,70	43,09	43,20
Total	47,24	49,18	47,68	48,99	44,71	45,85
Diploma 1-4/S 1-3						
Laki-laki	18,14	18,05	15,4	18,5	17,83	20,66
Perempuan	15,52	18,00	13,91	17,97	16,24	20,97
Total	16,18	18,02	14,64	18,23	17,02	20,82

Sumber : BPS, Susenas 2025



Tabel 3.4

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, tahun 2020-2025

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jakarta Barat	10,63	10,78	11,13	11,23	11,24	11,25
DKI Jakarta	11,13	11,17	11,31	11,45	11,49	11,59

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia (2020-2025)

Tabel 3.5

Harapan Lama Sekolah (RLS) Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, tahun 2020-2025

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jakarta Barat	12,8	12,81	12,82	12,87	13,14	13,47
DKI Jakarta	12,98	13,07	13,08	13,33	13,51	13,8

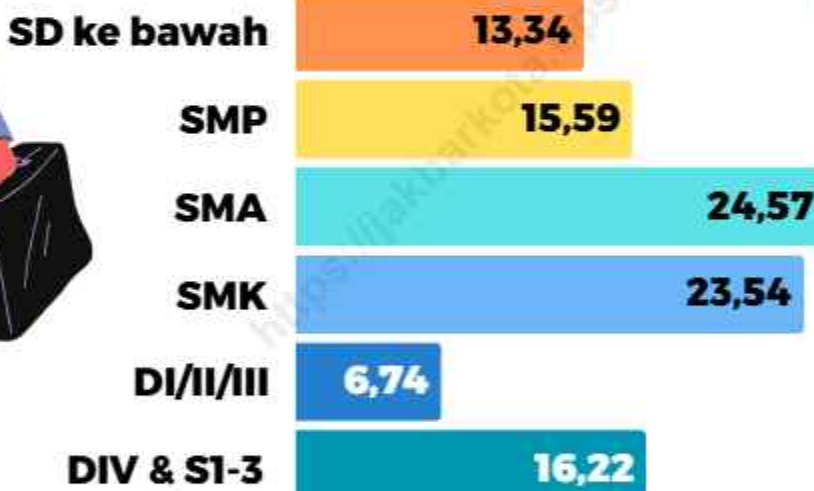
Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia (2020-2025)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KOTA JAKARTA BARAT, 2025

6,02

 persen (%)

Komposisi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Terakhir di Kota Jakarta Barat, 2025



4

Penduduk Jakarta Barat yang bekerja didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Sementara lulusan perguruan tinggi masih berada di bawah 25 persen dari total pekerja.

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) - BPS

KETENAGAKERJAAN



BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Sebagaimana tertuang dalam Astacita Prabowo – Gibran pada poin keempat yaitu, “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, Indikator Ketenagakerjaan menjadi perhatian penting untuk sasaran pembangunan sumber daya manusia. Penguatan sumber daya manusia ini tentunya tidak luput dari kondisi berbagai indikator ketenagakerjaan sebelum Astacita poin keempat ini dicanangkan.

Pada pembangunan sumber daya manusia, setiap upaya pembangunannya selalu diarahkan kepada manusia di berbagai aspek, baik sosial maupun ekonomi. Meningkatnya kualitas indikator ketenagakerjaan tentunya bermuara pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, meningkatnya kualitas sumber daya juga dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, seperti status perkawinan, status pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya.

Berbagai fenomena sudah tergambar dari jutaan penelitian yang dilakukan mengenai ketenagakerjaan, dimulai dari karakteristik tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kemudian kelompok umur tertentu yang peluangnya lebih tinggi untuk masuk ke pasar tenaga kerja, hingga memberikan pertimbangan bagi masyarakat atau publik untuk memilih sektor mana yang lebih banyak tersebar di Indonesia (formal atau informal). Selain itu juga, kondisi angkatan kerja memberikan gambaran penting bagi masyarakat mengenai karakteristik apa yang tengah mendominasi, misalnya apakah pengangguran didominasi oleh *fresh graduate*? Atau apakah sekarang sudah banyak yang memilih sekolah kejuruan dan masuk ke pasar tenaga kerja dibandingkan melanjutkan ke pendidikan tinggi?

Selain hal-hal di atas, berbagai aspek sosial dan kependudukan yang dapat diamati secara kasat mata adalah perkembangan jumlah penduduk, sebagai akibat adanya perubahan tingkat kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk, yang mana sangat mempengaruhi struktur penduduk menurut umur. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya usia kerja dan angkatan kerja. Sebagai konsekuensinya, pembangunan di bidang ketenagakerjaan selayaknya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja,

perluasan kesempatan kerja dan kemampuan berusaha. Hal ini dimaksudkan untuk menampung ledakan penduduk usia produktif yang masuk dalam angkatan kerja. Adanya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

4.1. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ketenagakerjaan digambarkan oleh diagram ketenagakerjaan sebagai berikut.




Sumber: Sakernas, BPS

Gambar 4.1 Diagram Ketenagakerjaan

Penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan bukan usia kerja adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun (UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003). Penduduk usia kerja dibagi ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi.

Struktur penduduk dalam kelompok angkatan kerja mencakup penduduk yang kegiatan utamanya bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang



masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya (pensiunan, orang jompo, orang cacat, penerima pendapatan dan lainnya). Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi.

4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja adalah *General Economic Activity Ratio* (Rasio Aktivitas Ekonomi Umum) atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menggambarkan persediaan tenaga kerja dalam pasar kerja dan biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.

Selama tiga tahun terakhir TPAK Jakarta Barat terus menunjukkan penurunan. Pada Agustus 2023, TPAK Kota Jakarta Barat mencapai 64,80 persen, kemudian pada Agustus 2024 turun menjadi 64,12 persen, dan pada Agustus 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 63,71 persen. Angka TPAK sebesar 63,71 persen memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, hampir 64 orang diantaranya adalah angkatan kerja, sedangkan sekitar 36 persen adalah bukan angkatan kerja. Selama tiga tahun terakhir TPAK Jakarta Barat terus menunjukkan penurunan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta (Gambar 4.2), selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2025, TPAK Kota Jakarta Barat cenderung masih berada di bawah TPAK Provinsi DKI Jakarta, walaupun tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Provinsi DKI Jakarta mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, sehingga sebaran penduduk seperti usia, status bersekolah, hingga pendidikan juga turut memengaruhi dinamika TPAK tersebut.



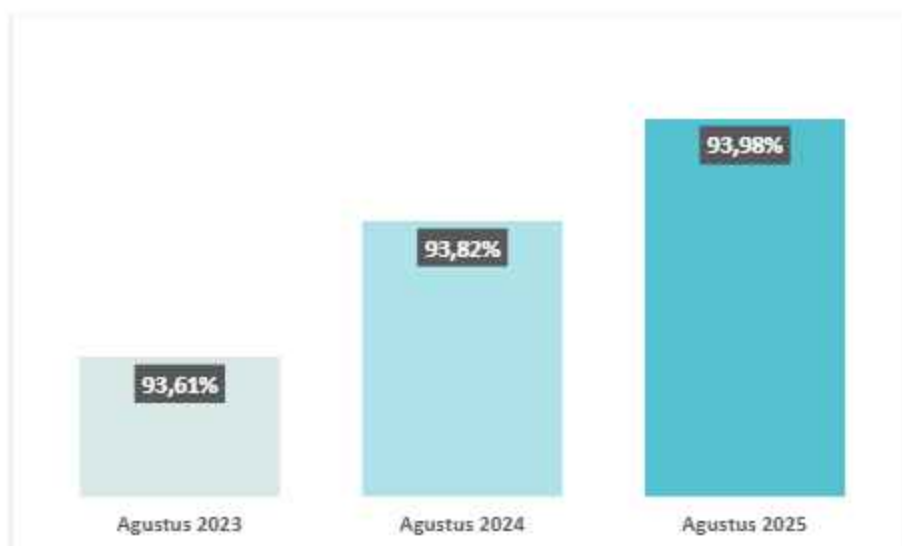
Sumber : Badan Pusat Statistik - SAKERNAS Agustus, 2023-2025

Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, Agustus 2023-2025

4.3. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan kesempatan seseorang untuk masuk pada pasar kerja dan indikator ini sering digambarkan juga sebagai gambaran persaingan kerja di suatu daerah. Secara formula, TKK merupakan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja.

Selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2025, TKK cenderung terus meningkat. Pada Agustus 2025, peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja mencapai 93,98 persen, lebih tinggi dari tahun 2024. Hal ini memberikan informasi bahwa dari 100 orang angkatan kerja, sebanyak 93 hingga 94 orang diantaranya adalah penduduk bekerja, sedangkan sisanya penduduk yang mencari kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik - SAKERNAS Agustus, 2023-2025

Gambar 4.3 Tingkat Kesempatan Kerja di Jakarta Barat, Agustus 2023 - Agustus 2025

4.4. Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

4.4.1. Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin

Analisis mengenai penduduk bekerja menurut jenis kelamin dilakukan untuk mengetahui komposisi atau dominasi pekerja suatu wilayah menurut jenis kelamin.

Pada Agustus 2025, komposisi pekerja didominasi oleh laki-laki dengan proporsi sebesar 62,17 persen. Namun jika diperhatikan, komposisi ini sedikit bergeser 0,23 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang bekerja mengalami kenaikan.



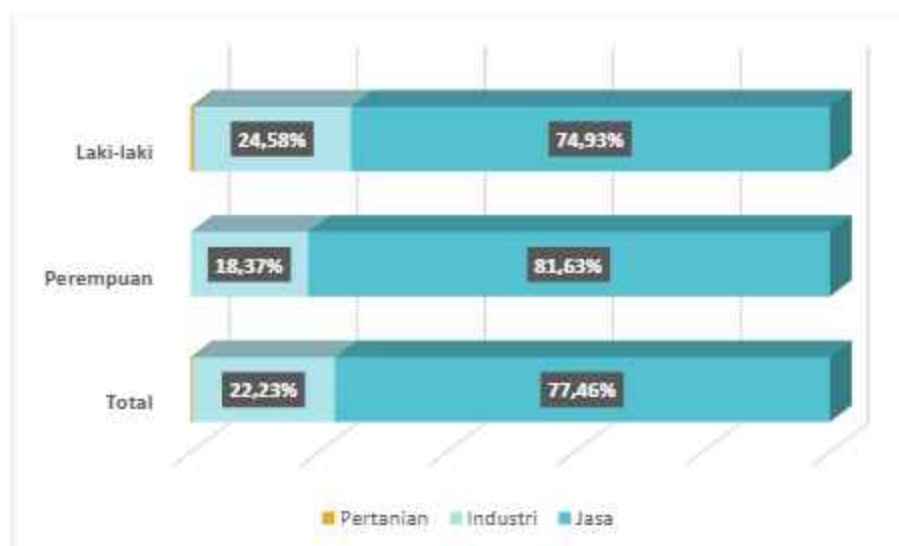
Sumber : Badan Pusat Statistik - SAKERNAS Agustus, 2023-2025

Gambar 4.4 Persentase Penduduk Bekerja terhadap Total Pekerja menurut Jenis Kelamin di Jakarta Barat, Agustus 2023 – Agustus 2025

Terjadinya peningkatan TKK dan pergeseran komposisi penduduk bekerja dari total pekerja yang sedikit meningkat untuk perempuan mengindikasikan bahwa terjadi juga peningkatan jumlah perempuan yang masuk ke pasar tenaga kerja. Jika dilihat dari tiga tahun terakhir, tren menunjukkan bahwa komposisi perempuan terus meningkat. Hal ini tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya juga akan terjadi keseimbangan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja.

4.4.2. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Analisa mengenai penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dilakukan untuk mengetahui lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Seperti yang telah diketahui pada tahun 2025, penyerapan penduduk yang bekerja terhadap total penduduk usia kerja mencapai 93,98 persen.




Sumber : Sakernas Agustus, 2025

Gambar 4.5 Persentase Penduduk Bekerja terhadap Total Pekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Jakarta Barat, Agustus 2023 – Agustus 2025

Pada Agustus 2025, lapangan usaha yang bergerak di bidang Jasa-Jasa menjadi sandaran hidup paling utama penduduk Kota Jakarta Barat, yang mana angka tersebut hampir mencapai 1,16 juta pekerja. Dominasi lapangan usaha bidang Jasa-Jasa ini masih kokoh di tahun 2025 mencapai 905 ribu jiwa (walaupun mengalami pergeseran komposisi di bidang jasa sebanyak empat ribu jiwa dari tahun 2025). Bidang Jasa-Jasa ini meliputi: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Pada tahun 2025 komposisi pekerja menurut Lapangan Usaha Utama ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pertanian masih stagnan di bawah 1 persen, yang mana menggambarkan sesuai dengan kondisi pertanian di Kota Jakarta Barat. Luas lahan pertanian yang sangat kecil mempengaruhi penyerapan tenaga kerjanya yang juga rendah. Selain itu, lapangan usaha pertanian juga bukan merupakan lapangan usaha unggulan di Kota Jakarta Barat.



Jika dicermati lebih dalam berdasarkan Jenis Kelamin, komposisi laki-laki dan perempuan cukup serupa namun nilai kontribusinya berbeda. Dari total pekerja perempuan, yang bekerja di Bidang Jasa-jasa sangat mendominasi hingga mencapai 81,63 persen pada Agustus 2025. Pekerja di bidang pertanian bahkan hampir mendekati nol persen yang berarti kontribusi tersebut bernilai sangat kecil. Komposisi perempuan yang lebih kecil dari laki-laki yang bekerja di Bidang Industri menandakan bahwa memang lebih banyak pekerja laki-laki yang masuk pasar tenaga kerja Bidang Industri. Penyerapan tenaga kerja industri dapat dikatakan lebih mendominasi untuk jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan.

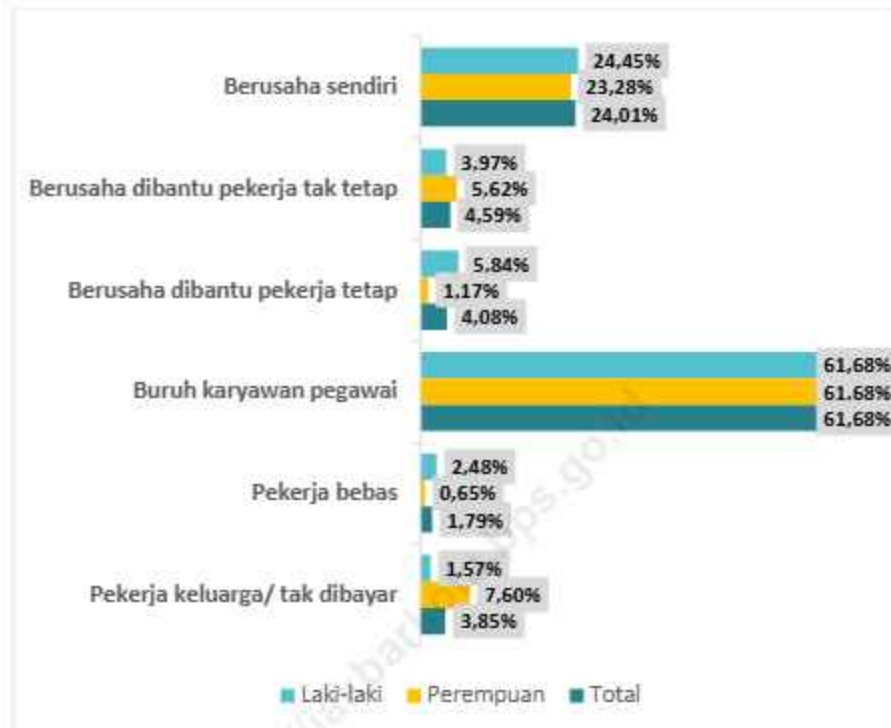
4.4.3. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja digolongkan ke dalam berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Pada Gambar 4.6, terlihat bahwa selama Agustus 2025 menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin. Secara umum, struktur status pekerjaan utama baik laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama. Buruh/karyawan masih mendominasi penduduk yang bekerja di Kota Jakarta Barat tahun 2025 baik laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 61,68 persen. Selain menjadi buruh/karyawan, pekerja di Kota Jakarta Barat tahun 2025 baik laki-laki dan perempuan juga didominasi dengan berusaha sendiri yang masing-masing mencapai 24,45 dan 23,28 persen.

Perbedaan yang paling mencolok antara laki-laki dan perempuan di Kota Jakarta Barat yaitu pada status pekerja keluarga atau tak dibayar. Perempuan yang biasanya menjadi ibu rumah tangga seringkali menjadi pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar karena pada umumnya berniat hanya melakukan kegiatan sampingan dari mengurus rumah tangga. Namun, pada kenyataannya kesibukan tersebut menjadi kegiatan utama karena jam kerja yang lebih tinggi daripada mengurus rumah tangga sehingga tergolong sebagai angkatan kerja.

Selain itu juga, perempuan yang sudah berstatus 'kawin', banyak menjadi pekerja keluarga sebagai tenaga bantuan untuk membantu kepala rumah tangga (umumnya laki-laki).



Sumber: Sakernas Agustus, 2025

Gambar 4.6 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Jakarta Barat, Agustus 2025

4.4.4. Pekerja Formal dan Informal

Pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap biasanya digolongkan ke dalam pekerja sektor formal, sedangkan pekerja berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar digolongkan ke dalam sektor informal.

Tingginya persentase orang yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai bila dibandingkan dengan status pekerjaan lain menyebabkan porsi pekerja formal masih lebih besar dibandingkan pekerja informal. Hal ini juga menunjukkan banyaknya keberadaan usaha berskala besar yang mendukung perekonomian di Kota Jakarta Barat.



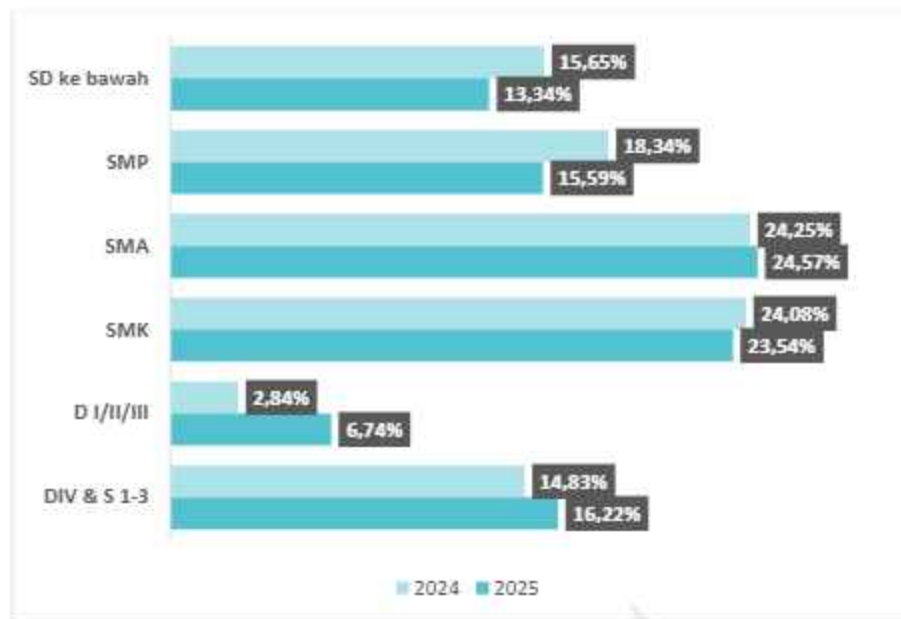
Sumber: Sakernas Agustus, 2024-2025

Gambar 4.7 Persentase Pekerja Formal dan Informal di Jakarta Barat, Agustus 2024 - Agustus 2025

Pekerja formal baik pada Agustus 2024 dan 2025 di Kota Jakarta Barat masih mendominasi dibandingkan informal. Lebih dari 60 persen dari pekerja di Kota Jakarta Barat merupakan pekerja formal. Pekerja formal pada Agustus 2025 mengalami sedikit penurunan kontribusi dibandingkan Agustus 2024 sebesar 0,53 persen poin. Sebaliknya, pekerja informal pada Agustus 2025 mengalami peningkatan.

4.4.5. Penduduk Bekerja menurut Pendidikan

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan (Gambar 4.8), penduduk bekerja di Kota Jakarta Barat baik pada Agustus 2024 dan 2025 secara umum memiliki pola. Pola tersebut ditunjukkan dari penduduk bekerja yang didominasi oleh lulusan pendidikan SMA/ sederajat (Umum dan Kejuruan). Pada Agustus 2025 persentase lulusan SMA Umum dan SMK mencapai masing-masing sebesar 24,57 dan 23,54 persen. Sementara pada tahun 2024 adalah masing-masing sebesar 24,25 dan 24,08 persen.



Sumber: Sakernas Agustus, 2024-2025

Gambar 4.8 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Jakarta Barat, Agustus 2024 - Agustus 2025 (Persen)

Peningkatan komposisi penduduk bekerja yang cukup menggembarakan terjadi pada pekerja dengan pendidikan tinggi. Pekerja dengan pendidikan DI/II/III naik dari 2,84 persen pada tahun 2024 menjadi 6,74 persen pada tahun 2025. Demikian juga dengan pekerja dengan pendidikan DIV/S1/S2/S3 meningkat dari 14,83 persen menjadi 16,22 persen pada tahun 2025.

4.5. Pengangguran Terbuka

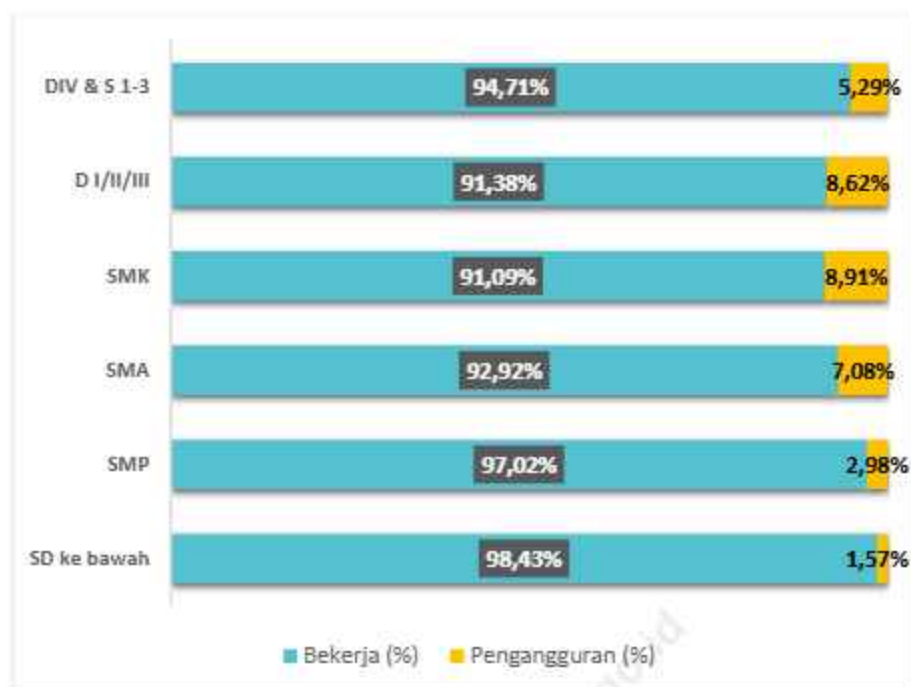
Tingkat pengangguran terbuka (*open unemployment rate*) merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Indikator ini memberikan informasi tentang jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Selain pencari kerja, yang juga termasuk pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja, tetapi sedang mempersiapkan usaha, mereka yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan tetapi mau menerima tawaran pekerjaan.



Sumber: Sakemas Agustus, 2023-2025

Gambar 4.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, Agustus 2023 - Agustus 2025 (Persen)

Pada Gambar 4.9, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan tiap tahunnya. TPT pada Agustus 2023 sebesar 6,39 persen berangsur turun pada tahun 2024 sebesar 0,21 persen poin, dan terus mengalami penurunan kembali hingga tahun 2025 mencapai 6,02 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah kembali pada posisi normal sebelum pandemi melanda.



Sumber: Sakernas Agustus, 2025

Gambar 4.10 Keadaan Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Jakarta Barat, Agustus 2025

TPT juga dapat lebih menarik lagi jika dikaji lebih dalam menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan. Pada Gambar 4.10, penduduk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami komposisi penduduk yang menganggur lebih tinggi dibandingkan penduduk dengan lulusan pendidikan lainnya, yaitu mencapai 8,91 persen. Pada sisi lain, lulusan SMK justru diharapkan dapat dengan mudah masuk ke pasar tenaga kerja. Namun pada kenyataannya, hanya 91,09 persen dari penduduk lulusan SMK yang berkesempatan untuk bekerja.

Selanjutnya dari penduduk dengan lulusan pendidikan tinggi juga mempunyai komposisi menganggur yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pendidikan lain di bawahnya. Lulusan DI/II/III yang menganggur sebanyak 8,62 persen dan lulusan DIV & S1-3 sebanyak 5,29 persen. Angka ini justru lebih tinggi dari total TPT Kota Jakarta Barat sebesar 6,18 persen. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat memunculkan fenomena ini, yaitu pasar tenaga kerja yang kualifikasinya masih berada di bawah ekspektasi para lulusan pendidikan tinggi, atau memang belum tersedianya lapangan kerja yang dapat menampung seluruh lulusan pendidikan tinggi di Kota Jakarta Barat.

Tabel 4.1
Keadaan Ketenagakerjaan Jakarta Barat, Agustus 2023 - Agustus 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Jakarta Barat		
	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (orang)	1.921.381	1.936.246	1.953.009
Angkatan Kerja (orang)	1.244.993	1.241.432	1.244.249
Bekerja (orang)	1.165.483	1.164.743	1.169.339
Laki-laki	727.562	726.807	726.974
Perempuan	437.921	437.936	442.365
Pengangguran (orang)	79.510	76.689	74.910
Bukan Angkatan Kerja (orang)	676.388	694.814	708.760
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,80	64,12	63,71
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93,61	93,82	93,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,39	6,18	6,02

Sumber: Sakernas Agustus, 2023-2025

Tabel 4.2
Persentase Penduduk Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kota Jakarta Barat, Agustus 2024-2025 (Persen)

Kelompok Lapangan Usaha/Sektor	Agustus 2024	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)
1 Pertanian	0,51	0,31
2 Manufaktur	22,13	22,23
3 Jasa-Jasa	77,36	77,46
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus, 2024-2025

Tabel 4.3
 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama
 dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, Agustus 2025 (Persen)

Status Pekerjaan Utama (1)	Agustus 2025	
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)
1. Berusaha sendiri	24,45	23,28
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	3,97	5,62
3. Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	5,84	1,17
4. Buruh/karyawan/pegawai	61,68	61,68
5. Pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian	2,48	0,65
6. Pekerja keluarga/tak dibayar	1,57	7,60
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus, 2025

Tabel 4.4
 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan
 di Kota Jakarta Barat, Agustus 2024- Agustus 2025 (Persen)

Pendidikan (1)	Agustus 2024 (2)	Agustus 2025 (3)
SD ke bawah	11,28	13,34
SMP	19,52	15,59
SMA Umum	28,97	24,57
SMA Kejuruan	23,72	23,54
Diploma I/II/III	2,66	6,74
Diploma IV/S1/S2/S3	13,85	16,22

Sumber: Sakernas Agustus, 2024-2025

Tabel 4.5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jakarta Barat,
Agustus 2023 - Agustus 2025 (Persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
<i>Agustus 2023</i>	6,39
<i>Agustus 2024</i>	6,18
<i>Agustus 2025</i>	6,02

Sumber: Sakernas Agustus, 2023-2025

<https://jakbarkota.bps.go.id>

UMUR HARAPAN HIDUP KOTA JAKARTA BARAT tahun 2025

76,23

 tahun

Angka Morbiditas Penduduk Kota Jakarta Barat tahun 2025



Laki-Laki

7,43



Perempuan

8,81



Total

8,13

5

Umur Harapan Hidup Kota Jakarta Barat mengalami peningkatan sebesar 0,25 tahun. Peningkatan ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 0,17 tahun

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - BPS

KESEHATAN

BAB V

KESEHATAN

Derajat kesehatan penduduk adalah dimensi penting dalam kesejahteraan yang mencerminkan kualitas fisik masyarakat. Kesehatan yang baik menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kesehatan, semakin mendukung pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya yang terkait dengan perawatan kesehatan serta kehilangan tenaga kerja. Selain itu, kesehatan yang baik juga meningkatkan kualitas hidup, memperkuat partisipasi sosial, dan mendukung pendidikan yang lebih baik, yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi jangka panjang.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik. Implementasi pembangunan di bidang kesehatan secara fisik terlihat pada pembangunan prasarana fisik dan penyediaan tenaga kesehatan. Upaya ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka menurunkan angka kesakitan masyarakat, angka kematian ibu dan bayi, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup. Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan adanya tenaga kesehatan bidan/penolong persalinan akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di sekitarnya dan factor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian ibu dan bayi. Tenaga kesehatan tersebut harus memiliki kompetensi yang baik dan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relative mudah, murah dan merata.

Selain memperluas akses kesehatan bagi seluruh masyarakat secara fisik dengan adanya fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan tenaga kesehatan, perluasan akses kesehatan juga mencakup aspek keterjangkauan secara finansial. Untuk itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk yang kurang mampu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Capaian upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain perkembangan angka harapan hidup, angka kesakitan (morbiditas), rata-rata lama sakit, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya.

5.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan suatu wilayah dapat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk, terutama AHH saat lahir. AHH saat lahir menunjukkan perkiraan rata-rata usia hidup yang dapat dicapai seseorang sejak lahir. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan derajat kesehatan masyarakat. AHH yang rendah menuntut adanya program pembangunan kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi dan kalori, serta upaya pengentasan kemiskinan.



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

Gambar 5.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2023-2025

Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2023-2025 mengalami peningkatan. Tahun 2025 angka harapan hidup di Kota Jakarta Barat sebesar 76,23, artinya bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2026 diperkirakan akan dapat tetap hidup sampai usia 76 atau 77 tahun. Pada tahun 2023, AHH Kota Jakarta Barat memiliki angka

yang sama dengan AHH Provinsi DKI Jakarta. Walaupun begitu, AHH Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025, bahkan terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2024 ke 2025.

Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat serta mencerminkan keberhasilan pemerintah meningkatkan kualitas hidup warganya. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

Selain Angka Harapan Hidup (AHH), derajat kesehatan penduduk juga diukur melalui Angka Kesakitan atau Morbiditas. Berdasarkan Susenas, Morbiditas mencerminkan keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, atau aktivitas lainnya. Keluhan tersebut mencakup gangguan fisik, mental, kecelakaan, serta dampak penyakit kronis yang telah sembuh.

Kesehatan adalah kebutuhan utama manusia. Ketika kesehatan terjaga, aktivitas sehari-hari dapat berjalan optimal. Sebaliknya, tingginya angka keluhan kesehatan mencerminkan rendahnya derajat kesehatan di suatu wilayah, yang memerlukan perhatian dan intervensi yang serius.

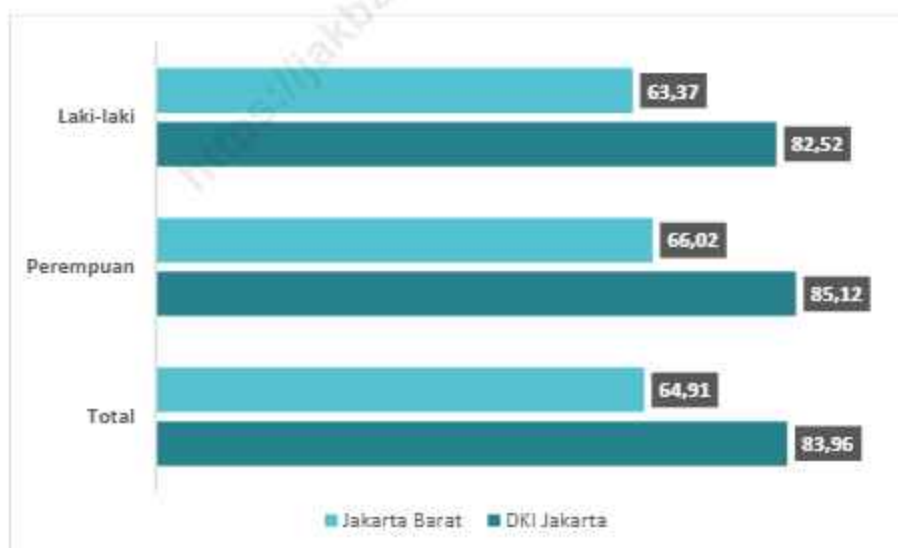


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) – BPS, 2025

Gambar 5.2 Angka Morbiditas Penduduk Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2025 (Persen)

Hasil Susenas tahun 2025 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat mencapai 8,13. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir. Semakin tinggi angka morbiditas, semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan Kesehatan, baik itu fisik maupun mental. Angka Kesakitan penduduk perempuan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, masing-masing sebesar 8,81 dan 7,43 persen, sejalan dengan tahun 2024. Angka morbiditas Kota Jakarta Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka morbiditas Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan menyentuh 8,92 persen. Angka morbiditas perempuan di DKI Jakarta juga memiliki angka yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Angka morbiditas Kota Jakarta Barat lebih rendah dari Provinsi DKI Jakarta, tetapi ini tidak dapat dikatakan bahwa kondisi ini sudah baik. Tentunya angka morbiditas perlu untuk terus ditekan di setiap tahunnya agar produktivitas penduduk terus meningkat, beban sistem kesehatan berkurang, serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025 – BPS

Gambar 5.3 Persentase penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat dan DKI Jakarta, 2025 (Persen)

Sementara itu, persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir merupakan salah satu indikator yang menunjukkan gambaran terkait derajat kesehatan penduduk serta tingkat kesadaran kesehatan pada masyarakat. Pada tahun 2025, secara rata-rata penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat yang mempunyai keluhan kesehatan sebanyak 22,83 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan Kota Jakarta Barat yang mempunyai keluhan kesehatan justru lebih banyak dibandingkan persentase penduduk laki-laki, yaitu mencapai 25,04 persen. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Barat lebih sedikit dibandingkan DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk yang cukup tinggi.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025 – BPS

Gambar 5.4 Penduduk yang Berobat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan Kota Jakarta Barat, 2025 (Persen)

Sementara itu, persentase penduduk yang berobat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan gambaran mengenai kesadaran penduduk dalam menggunakan fasilitas kesehatan oleh penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2025, secara rata-rata penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat yang menggunakan jaminan Kesehatan sebanyak 64,91 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan Kota Jakarta Barat yang melakukan rawat jalan dengan memanfaatkan jaminan kesehatan justru lebih banyak dibandingkan persentase penduduk laki-laki, yaitu mencapai 66,02 persen.



5.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan serta daya tahan tubuh balita terhadap suatu penyakit. Kekebalan terhadap penyakit ada yang bersifat alami (bawaan sejak lahir) dan buatan (melalui vaksin). Imunisasi adalah upaya pemberian kekebalan tubuh balita terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan/meneteskan vaksin ke dalam tubuh sehingga balita memiliki daya tahan terhadap suatu jenis penyakit yang sedang mewabah. Selain itu, tujuan diberikannya imunisasi pada anak adalah agar bayi yang relatif masih rentan terhadap penyakit dapat terhindar dari penyakit berbahaya, kecacatan atau kematian.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan balita melalui imunisasi dapat dilihat dari pemberian Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) di puskesmas yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, DPT serta campak/morbili sebelum usia 1 tahun. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya.

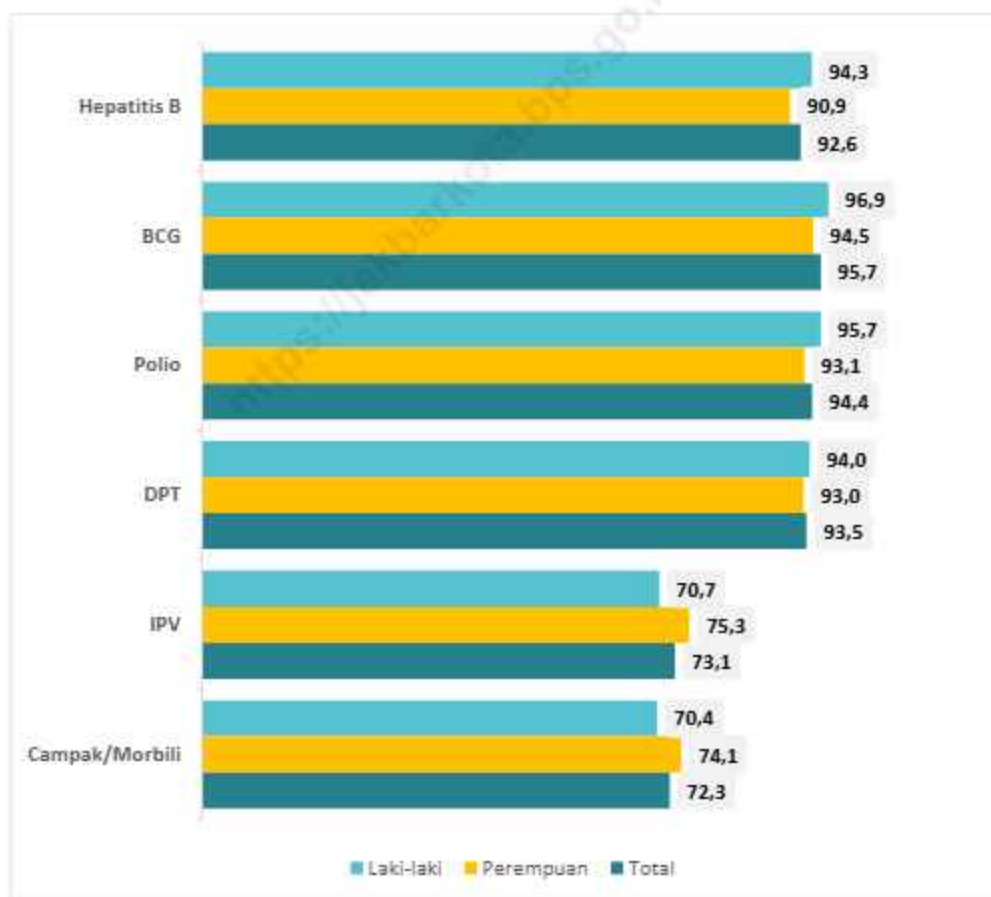
Kepedulian orang tua di Kota Jakarta Barat mengenai pentingnya imunisasi bagi anak khususnya balita dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase pemberian imunisasi dasar pada balita yang sudah mencapai 95 persen meskipun tidak untuk semua jenis imunisasi. Jenis imunisasi yang paling banyak dilakukan adalah BCG sebesar 95,7 persen. Sedangkan imunisasi campak/morbili masih kurang, yaitu di bawah angka 72,3 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup berarti antara pemberian imunisasi pada balita laki-laki dan perempuan. Pada balita laki-laki, capaian pemberian imunisasi cenderung lebih tinggi dibanding balita perempuan untuk jenis imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, dan DPT. Sedangkan untuk jenis imunisasi IPV dan Campak/Morbili lebih tinggi pada balita perempuan. Perbedaan terbesar antar laki-laki dan perempuan terdapat pada pemberian jenis imunisasi IPV, yaitu perempuan lebih besar 4,6 persen.

Secara umum, baik balita laki-laki maupun perempuan, capaian imunisasi campak/morbili merupakan yang terendah, yaitu sebesar 72,3 persen. Namun, angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 80,58 persen. Hal ini diduga karena imunisasi campak tidak sepopuler imunisasi lainnya. Selain itu, waktu pemberian imunisasi dengan jadwal yang berbeda dengan lainnya sehingga terkadang orang tua

lalai dalam memberikan imunisasi ini pada balitanya. Padahal jenis imunisasi ini sangat penting untuk melindungi dari penyakit campak/morbili, tetapi tingkat keparahannya dapat diminimalisasi. Karena penyakit campak/morbili pada penderita belum pernah divaksinasi, dapat menyebabkan kematian.

Imunisasi merupakan salah satu investasi Kesehatan yang paling murah (*cost effective*) karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian sakit, cacat, dan kematian. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengamanatkan pemerintah untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Berdasarkan hasil Susenas 2025, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi dapat dilihat pada Gambar 5.5. Data yang ditampilkan adalah data balita usia 1-4 tahun agar dapat dianalisis cakupan imunisasinya saat berusia 0-11 bulan.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025 – BPS

Gambar 5.5 Persentase Balita Usia 1-4 tahun yang Mendapat Imunisasi Lengkap di Kota Jakarta Barat, 2025 (Persen)



5.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Salah satu tolak ukur pembangunan kesehatan dari sisi *supply* adalah tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan secara merata. Namun demikian, ukuran pembangunan tersebut menjadi kurang berarti apabila tidak dilengkapi dengan ukuran pembangunan dari sisi *demand*, yaitu perilaku aktif masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Perilaku aktif masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dianalisis mulai dari proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Hal ini disebabkan karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan. Sedangkan penyebab kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal. Oleh karena itu, kematian ibu dan bayi dapat dicegah dengan penolong persalinan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan.

Pada Susenas 2025, semua perempuan usia 15-49 tahun melakukan persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan, yaitu mencapai 100 persen. Kondisi ini terjadi pada semua lapisan ekonomi dan pada semua tingkat pendidikan masyarakat. Ini menunjukkan kesadaran mengenai pentingnya proses persalinan yang baik telah menyentuh semua lapisan masyarakat, dari berbagai tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan.

Selain itu, dikumpulkan informasi mengenai perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak dalam dua tahun terakhir dengan tenaga penolong persalinan. Berdasarkan hasil pendataan Susenas, lebih dari setengah perempuan berusia 15-49 tahun yang melahirkan anak dalam 2 tahun terakhir dengan tenaga penolong persalinan oleh dokter kandungan, yaitu sebesar sebesar 39,52 persen. Sedangkan sisanya sebesar 60,48 persen merupakan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Jakarta Barat telah memiliki kesadaran terkait proses persalinan yang baik untuk kesehatan ibu dan anak.

Tabel 5.1
 Persentase Pemberian Imunisasi Dasar pada Balita menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2025 (Persen)

Jenis Imunisasi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Hepatitis B	94,3	90,9	92,6
BCG	96,9	94,5	95,7
Polio	95,7	93,1	94,4
DPT	94,0	93,0	93,5
IPV	70,7	75,3	73,1
Campak/Morbili	70,4	74,1	72,3

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025 – BPS

Tabel 5.2
 Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Menurut Tempat Melahirkan Anak yang Terakhir di Kota Jakarta Barat, 2025 (Persen)

Tempat Melahirkan	Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan ART		Total
	40% bawah	40% menengah	20% atas	SD ke bawah	SMP ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitas Kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tidak di Fasilitas Kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025 – BPS

Tabel 5.4
 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Proses Persalinan ALH yang Terakhir di Kota Jakarta Barat, 2025 (Persen)

Tenaga Penolong Kelahiran	Persentase
(1)	(2)
Dokter Kandungan	39,52
Bidan	57,12
Lainnya	3,36

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025 - BPS

Persentase Rumah Tangga yang Berstatus Memiliki Rumah Sendiri Kota Jakarta Barat Tahun 2025

60,10

 tahun

Persentase Rumah Tangga menurut Keberadaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar yang Digunakan Sendiri di Kota Jakarta Barat, 2023-2025



6

Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas Buang Air Besar mencerminkan kemajuan positif dan berkelanjutan dalam akses sanitasi rumah tangga, dengan capaian semakin besar.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - BPS

PERUMAHAN

BAB VI

PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Rumah sebagai tempat tinggal digunakan untuk tempat berlindung dari panas dan hujan. Tempat tinggal dan lingkungan yang baik merupakan hak setiap warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dalam perkembangannya tempat tinggal mengalami penambahan fungsi yang dapat menunjukkan tingkat sosial keluarga dalam masyarakat. Berbagai fasilitas di dalam rumah tinggal yang semakin lengkap menambah tingkat kesejahteraan penghuninya, seperti luas lantai yang dipergunakan, sumber dan penggunaan air, jenis penerangan rumah, serta penanganan tempat pembuangan air besar/kotoran.

6.1 Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat karena mencerminkan kemampuan individu atau rumah tangga untuk mengakses dan memiliki properti. Kepemilikan rumah juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi jangka panjang, di mana rumah dianggap sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2025, status kepemilikan rumah masyarakat di Kota Jakarta Barat menunjukkan variasi yang signifikan berdasarkan distribusi pengeluaran perkapita, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga. Tabel 6.1 menunjukkan secara lengkap persentase rumah tangga menurut karakteristik dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. Rumah tangga dengan pengeluaran lebih tinggi cenderung memiliki rumah sendiri, baik secara langsung maupun melalui pembiayaan kredit perumahan. Sebaliknya, rumah tangga dengan pengeluaran lebih rendah lebih banyak mengontrak atau tinggal di rumah sewa. Perbedaan ini mencerminkan keterkaitan erat antara kemampuan ekonomi dan akses terhadap kepemilikan rumah.

Gambar 6.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2025 mayoritas rumah tangga di Kota Jakarta Barat memiliki status kepemilikan rumah milik sendiri, dengan persentase mencapai 60,10%. Sementara itu, sebesar 39,90% rumah tangga lainnya masih tinggal di rumah sewa atau mengontrak. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepemilikan rumah di kalangan masyarakat, yang mencerminkan kemampuan ekonomi yang lebih baik dalam mengakses properti. Indikator kepemilikan rumah ini menunjukkan perkembangan yang stagnan dari tahun 2024 hingga 2025.




Sumber: Susenas Maret, 2024-2025

Gambar 6.1 Perkembangan Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2024-2025 (Persen)

6.2 Fasilitas Rumah

Rumah yang sehat harus didukung oleh kelengkapan fasilitas yang memadai, yang pada akhirnya kelengkapan fasilitas tempat tinggal akan menentukan kualitas hidup penghuninya. Fasilitas yang paling mendasar agar sebuah rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, serta jamban dengan tangki septik di dalam rumah tersebut.

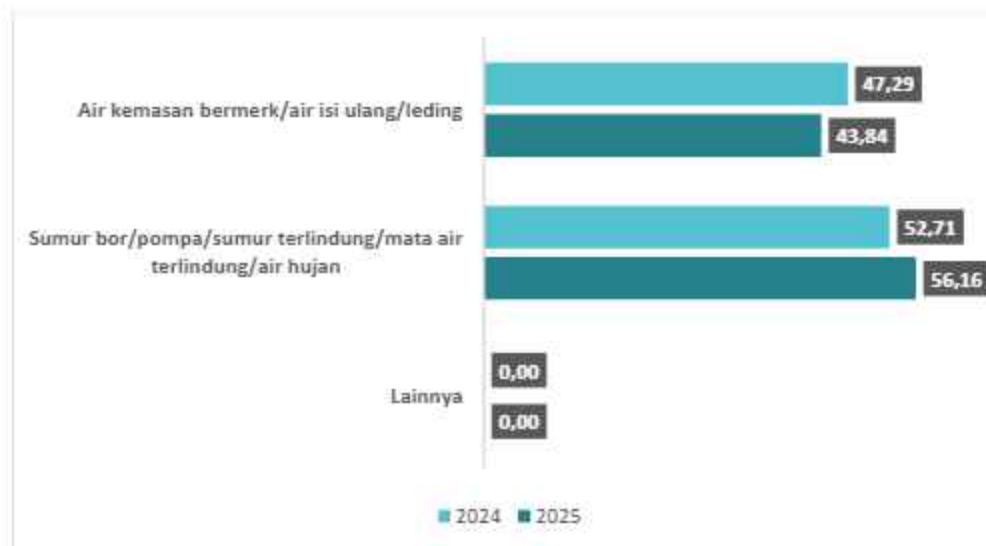
Ketersediaan listrik menjadi sangat penting selain pangan. Manfaat listrik untuk kehidupan sudah menjadi kebutuhan primer. Hampir seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan tidak terlepas dari peran listrik. Selain berfungsi sebagai penerangan, semua



peralatan rumah tangga membutuhkan listrik seperti AC, lemari es, dan *rice cooker*. Berdasarkan data yang disajikan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2025, sebanyak 99,76 persen rumah tangga di wilayah Kota Jakarta Barat telah terhubung dengan jaringan listrik yang disediakan oleh PLN. Hal ini mencerminkan tercapainya pemerataan akses listrik di kawasan tersebut, yang merupakan indikator positif dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat urban.

Selama tiga tahun terakhir, sebagian besar rumah tangga menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum di Kota Jakarta Barat. Pengguna air kemasan sebagai sumber air minum pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Beragam pilihan, praktis, variasi harga dan manfaat menjadi salah satu sebab masyarakat lebih senang mengonsumsi air kemasan. Di sisi lain, kenaikan yang signifikan ini dapat dipahami mengingat terjadinya krisis air bersih di Jakarta, sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik rumah tangga hingga limbah beracun dari industri. Hal ini juga dapat menggambarkan seiring dengan penurunan persentase rumah tangga yang menggunakan leding dan pompa air sebagai sumber air minum di setiap tahunnya hingga tahun 2025.

Air yang telah tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit pencernaan seperti kolera, tifus, disentri, cacingan, dan lain-lain dengan gejala diare. Keberadaan *E. Coli* di air dipengaruhi oleh banyak hal yakni konstruksi fisik sumur, baik dinding sumur, bibir sumur, lantai sumur, dan sarana pembuangan air limbah, serta jarak *septic tank* dengan sumur gali yang kurang dari 11 meter. Semakin dekat jarak maka semakin besar pula kemungkinan air sumur/pompa tersebut tercemar. Akibatnya derajat higienitas air yang diminum menjadi sangat rendah.



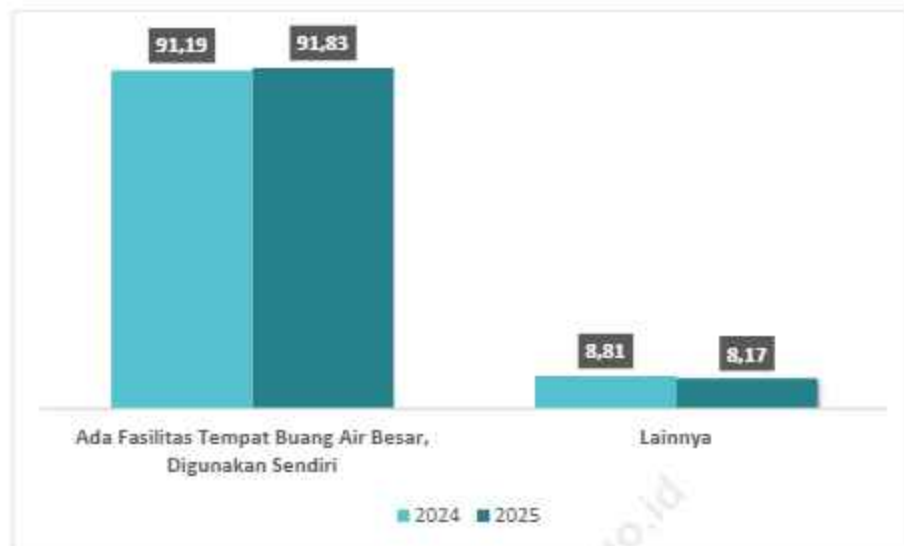
Sumber: Susenas Maret, 2024-2025

Gambar 6.2 Perkembangan Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll, 2024 – 2025

Selain peningkatan penggunaan air kemasan sebagai sumber air minum, terdapat perubahan signifikan pada sumber air utama yang digunakan rumah tangga di Kota Jakarta Barat untuk keperluan mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Gambar 6.2 dengan lengkap menunjukkan pada tahun 2024, sekitar 52,71 persen rumah tangga mengandalkan sumur sebagai sumber air utama untuk kegiatan sehari-hari, pada tahun 2025 persentase ini meningkat menjadi 56,16 persen. Sebaliknya, pada tahun 2024, terjadi penurunan penggunaan air kemasan sebagai sumber air utama untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan lainnya dari 47,29 persen menjadi 43,84 persen. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menyediakan sumber air yang lebih layak bagi masyarakatnya dan lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan air tanah.

Ketersediaan kakus/kloset dengan menggunakan tangki septik merupakan fasilitas rumah tangga yang cukup penting dan berkaitan dengan kesehatan. Salah satu cara pengelolaan terbaik tinja manusia adalah dengan menggunakan tangki septik (*septic tank*) dan resapannya. Pada Gambar 6.3 dapat

terlihat pada tahun 2025, sebesar 91,83 persen rumah tangga di Kota Jakarta Barat menggunakan fasilitas milik sendiri untuk buang air besar.



Sumber: Susenas Maret, 2024-2025

Gambar 6.3 Perkembangan Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik, Kepemilikan, dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2024 – 2025

Tabel 6.1

Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2025

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Jenis Kelamin KRT		Total
	40% bawah	40% menengah	20% atas	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik Sendiri	46,90	59,20	82,11	57,92	72,53	60,10
Lainnya	53,10	40,80	17,89	42,08	27,47	39,90
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) – BPS, 2025

Tabel 6.2

Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik, Kepemilikan, dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2025

Status Kepemilikan Fasilitas Tempat BAB	Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Jenis Kelamin KRT		Pendidikan Terakhir KRT		Total
	40% bawah	40% tengah	20% atas	Laki-laki	Perempuan	SD ke bawah	SMP ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Milik Sendiri	86,56	92,76	98,21	91,38	94,41	88,18	92,75	91,83
Lainnya	13,44	7,24	1,79	8,62	5,59	11,82	7,25	8,17
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) – BPS, 2025

Tabel 6.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2025

Sumber Air Utama yang Digunakan	Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Jenis Kelamin KRT		Pendidikan Tertinggi KRT		Total
	40% bawah	40% menengah	20% atas	Laki-laki	Perempuan	SD ke bawah	SMP ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Air kemasan bermerk/air isi ulang/leding	93,35	94,32	97,75	95,18	92,97	90,48	96,04	94,84
Sumur bor/pompa/sumur terlindung/mata air terlindung/air hujan	6,65	5,68	2,25	4,82	7,03	9,52	3,96	5,16
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) – BPS, 2025

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Konsumsi di Kota Jakarta Barat Tahun 2025

2.887 ribu rupiah

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Non Makanan di Kota Jakarta Barat Tahun 2025

Makanan
1.104.752 38,27%

Non Makanan
1.781.896 61,73%

Total
2.886.648 100%

7

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Jakarta Barat tahun 2025 meningkat sebesar 5,39 persen.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - BPS

**KONSUMSI & PENGELUARAN
RUMAH TANGGA**

BAB VII

KONSUMSI DAN PENGELUARAN PERKAPITA

Pengeluaran perkapita menjadi indikator yang identik jika sebuah topik membahas tentang kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera dapat diartikan sebagai masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti konsumsi makanan/pangan, pakaian/sandang, dan perumahan/papan.

Pemenuhan kebutuhan dasar ini dapat tercermin juga dari bagaimana aspek pendapatan masyarakat tersebut. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besaran dan pola konsumsi rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga biasanya akan diikuti oleh pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari konsumsi makanan ke konsumsi bukan makanan (*Engel's Law*). Di negara-negara maju, persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan biasanya berada di bawah 50 persen. Sedangkan komposisi pengeluaran untuk makanan di negara-negara berkembang pada umumnya di atas 50 persen.

Kondisi masyarakat Jakarta sudah mengikuti pola pengeluaran di negara maju, dimana sebagian besar porsi pengeluarannya dibelanjakan untuk kebutuhan selain makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Jakarta lebih tinggi dari kesejahteraan rata-rata masyarakat Indonesia. Namun demikian, terlihat proporsi pengeluaran makanan dan nonmakanan berfluktuasi seiring dengan kondisi perekonomian di ibukota selama kurun waktu tersebut.

Peningkatan pengeluaran tidak dapat secara langsung menggambarkan bagaimana aspek pendapatan masyarakat dapat dikatakan tinggi atau rendah, sehingga sebuah daerah atau negara dapat dikatakan sejahtera. Namun penghitungan pengeluaran dapat menjadi pendekatan untuk menghitung pendapatan masyarakat. Tingkat pengeluaran dapat juga menggambarkan pemerataan distribusi dan akses konsumsi antar kelompok masyarakat. Jika pengeluaran meningkat secara umum, dapat berarti masyarakat tersebut sudah semakin mampu mengakses pemenuhan konsumsinya.

Sehubungan dengan Astacita yang dicanangkan Prabowo - Gibran, fokus pemerintah terhadap pemerataan ekonomi semakin dijunjung tinggi. Pada Astacita

poin 6, Prabowo – Gibran berkomitmen untuk membangun pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan, yang mana kedua topik ini sangat berkaitan dengan indikator Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita.

7.1 Pengeluaran per Kapita menurut Kelompok Pengeluaran

Data pengeluaran rumah tangga yang telah dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, merupakan salah satu upaya untuk memperoleh gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran pola pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik untuk pengeluaran makanan maupun non makanan.

Data pengeluaran yang dikumpulkan adalah data pengeluaran seminggu atau sebulan yang lalu tergantung pada jenis pengeluarannya. Pengeluaran untuk makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, yang selanjutnya dihitung menjadi rata-rata pengeluaran untuk makanan selama sebulan. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan meliputi pengeluaran sebulan yang lalu dan 3 bulan yang lalu, selanjutnya dihitung menjadi pengeluaran non makanan rata-rata selama sebulan.



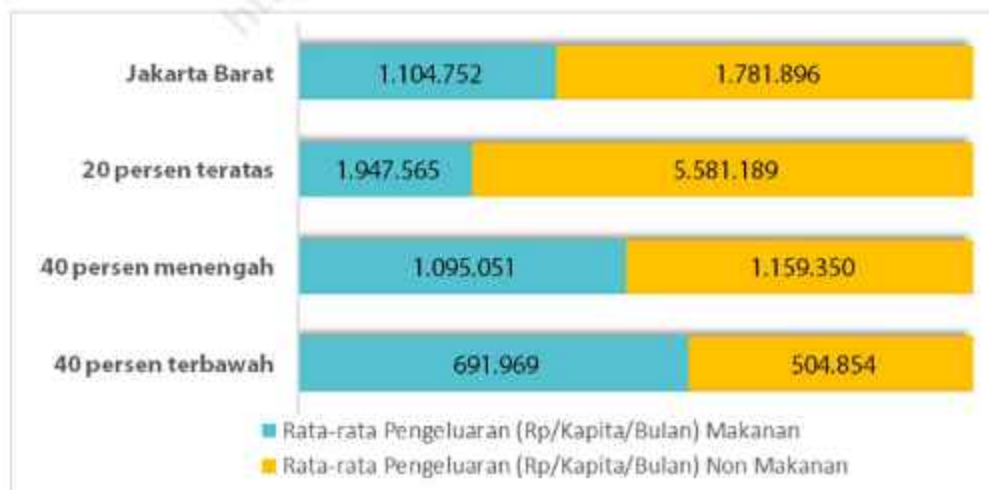
Gambar 7.1 Skema Pengeluaran Rumah Tangga

Seperti yang telah diulas sebelumnya, pola pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, dapat terlihat dari semakin banyaknya proporsi pendapatannya yang dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan, begitu

pula sebaliknya. Pendapatan dapat mencerminkan pemenuhan konsumsi sehingga jika pendapatan banyak dibelanjakan untuk non makanan, maka rumah tangga tersebut artinya sudah dapat memenuhi kebutuhan makanannya.


Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Jakarta Barat pada tahun 2025 (Gambar 7.2) adalah sebesar Rp2.886.648,-. Nominal ini mengartikan bahwa setiap orang penduduk Kota Jakarta Barat mengeluarkan sebanyak 2,9 juta rupiah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya setiap bulan. Jika dilihat berdasarkan jenis pengeluaran, konsumsi makanan dan non makanan penduduk Jakarta Barat secara berturut-turut mencapai Rp1.104.752,- dan Rp1.781.896,- perkapita setiap bulannya. Sebanyak 38,27 persen pengeluaran ini digunakan untuk membeli makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau, ikan, padi-padian serta sayuran. Selanjutnya untuk pengeluaran non makanan, sebanyak 61,73 persen total rata-rata pengeluaran penduduk Kota Jakarta Barat tahun 2025 dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan non makanan (Perumahan, Barang & Jasa, Pakaian, dll.).

Pangsa pengeluaran makanan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran makanan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, pangsa pengeluaran makanan penduduknya semakin kecil, demikian pula sebaliknya (BPS, 2020).



Sumber : Susenas Maret – BPS, 2025

Gambar 7.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Non Makanan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jakarta Barat, 2025 (Rupiah)



Bila dicermati lebih dalam pada Gambar 7.2, pola konsumsi akan berbeda menurut tingkat pendapatannya yang dicerminkan dari kelompok pengeluaran, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen tengah, dan 20 persen atas. Secara keseluruhan, pengeluaran penduduk Kota Jakarta Barat lebih banyak dialokasikan pada jenis pengeluaran non makanan. Pada penduduk dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, sebanyak 57,82 persen dari total pengeluaran dihabiskan untuk konsumsi makanan. Sementara proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan bagi penduduk dengan kelompok pengeluaran 40 persen menengah lebih kecil, yaitu sebesar 48,57 persen. Di sisi lain, pengeluaran untuk konsumsi makanan bagi kelompok pengeluaran 20 persen atas hanya mencapai 25,87 persen.

Dari pengklasifikasian penduduk menurut kelompok pengeluaran ini dapat disimpulkan bahwa penduduk dengan kelompok pengeluaran rendah masih memiliki prioritas untuk memenuhi kebutuhan makanan, sedangkan untuk penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran tertinggi sudah mampu mengeluarkan uang mereka untuk keperluan non makanan karena kebutuhan makanan sudah jauh terpenuhi.

Gambar 7.3 menunjukkan distribusi persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan tahun 2025. Persentase pengeluaran konsumsi makanan terbesar adalah kelompok komoditi Makanan dan Minuman Jadi sebesar 43,30 persen. Kelompok komoditi dengan persentase terbesar selanjutnya adalah Rokok dan Tembakau sebesar 7,72 persen, diikuti Padi-padian sebesar 7,09 persen. Kemudian komoditi Sayur-sayuran dan Ikan/udang/cumi/kerang yang masing-masing sebesar 6,94 dan 6,89 persen.

Dari struktur belanja makanan, dapat dilihat bahwa pembelian Rokok dan Tembakau menempati urutan kedua setelah Makanan dan Minuman Jadi. Konsumsi Rokok dan Tembakau yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan belanja makanan pokok Padi-padian ini bukan menjadi sebuah fenomena yang baru. Kecenderungan konsumsi rokok yang tinggi di Kota Jakarta Barat ini telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat memberikan gambaran yang memungkinkan jika konsumsi Rokok dan Tembakau sudah seperti konsumsi makanan pokok masyarakat, yang artinya sudah masuk ke kebutuhan yang tidak luput dari penduduk Kota Jakarta Barat.



Sumber : Susenas Maret - BPS, 2025

Gambar 7.3 Distribusi Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan Menurut Kelompok Komoditi di Kota Jakarta Barat, 2025

Temuan hasil studi Pusat Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran rokok sebesar 1 persen akan meningkatkan kemungkinan rumah tangga menjadi miskin sebesar 6 persen (Kemenkes RI, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena *substitution effect*, dimana sebagian rumah tangga miskin mengalokasikan anggaran terbatas mereka untuk rokok dibandingkan pangan bergizi. Akibatnya, konsumsi rokok tidak hanya mengurangi kualitas hidup dari sisi kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya garis kemiskinan. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi sosial-ekonomi kelompok miskin karena pengeluaran untuk rokok bisa mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan esensial lainnya seperti makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan.



Sumber : Susenas Maret - BPS, 2024

Gambar 7.4 Distribusi Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Non Makanan Menurut Kelompok Komoditi di Kota Jakarta Barat, 2025

Pada Maret 2025, sebagian besar pengeluaran non makanan penduduk digunakan untuk konsumsi kebutuhan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (termasuk bahan bakar, pelumas, penerangan, air dan pulsa). Pengeluaran penduduk untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga mencapai 49,95 persen dari total pengeluaran non makanan. Dengan kata lain, misalnya jika suatu rumah tangga memiliki alokasi untuk pengeluaran non makanan sebanyak 2 juta rupiah, maka pengeluaran untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga bisa mencapai hampir 1 juta rupiah.

Distribusi pengeluaran non makanan ini sudah tergambarkan dari tahun-tahun sebelumnya. Persentase yang terus meningkat disebabkan oleh adanya kenaikan berbagai bahan baku konstruksi, termasuk kenaikan harga sewa/kontrak rumah, tarif dasar listrik dan tarif air leding (PAM).

Selanjutnya, kelompok komoditi dengan persentase terbesar setelah Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga adalah kelompok komoditi Aneka Barang dan Jasa, yaitu sebesar 29,81 persen, yang mana merupakan pengeluaran yang meliputi barang-barang dan jasa-jasa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti barang non tahan lama (tisu, sabun, sampo, parfum, dll). Untuk pengeluaran Barang Tahan Lama, pengeluaran tersebut bukan yang bersifat aset (untuk usaha rumah tangga), melainkan barang tahan lama konsumsi rumah tangga seperti meja belajar untuk belajar di rumah, kasur, kursi, lemari pakaian, hingga pemeliharaannya.

Tabel 7.1
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan menurut Kelompok Pengeluaran Di Kota Jakarta Barat, 2025 (Rp/Kapita/Bulan)

Jenis Pengeluaran	Kelompok Pengeluaran			Jakarta Barat
	40 persen terbawah	40 persen menengah	20 persen teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	691.969	1.095.051	1.947.565	1.104.752
Non Makanan	504.854	1.159.350	5.581.189	1.781.896
Jakarta Barat	1.196.823	2.254.401	7.528.754	2.886.648

Sumber: BPS, Susenas Maret 2025

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel 7.2
Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan
menurut Jenis Pengeluaran Sebulan di Kota Jakarta Barat Tahun 2025

Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan	
	Nilai (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)
PADI-PADIAN	78.343	7,09%
UMBI-UMBIAN	8.731	0,79%
IKAN/UDANG/CUMI/KERANG	76.063	6,89%
DAGING	74.182	6,71%
TELUR DAN SUSU	65.356	5,92%
SAYUR-SAYURAN	76.719	6,94%
KACANG-KACANGAN	16.224	1,47%
BUAH-BUAHAN	66.623	6,03%
MINYAK DAN KELAPA	20.745	1,88%
BAHAN MINUMAN	24.852	2,25%
BUMBU-BUMBUAN	15.604	1,41%
KONSUMSI LAINNYA	17.731	1,60%
MAKANAN DAN MINUMAN JADI	478.325	43,30%
ROKOK DAN TEMBAKAU	85.252	7,72%
TOTAL MAKANAN	1.104.750	100,00%

Sumber : BPS, Susenas Maret 2025



Tabel 7.3
Rata-rata Pengeluaran Non Makanan per Kapita Sebulan
menurut Jenis Pengeluaran Sebulan di Kota Jakarta Barat Tahun 2025

JENIS PENGELUARAN NON MAKANAN	RATA-RATA PENGELUARAN NON MAKANAN PER KAPITA PER BULAN	
	Rp	%
(1)	(2)	(3)
PERUMAHAN DAN FASILITAS RUMAH TANGGA	889.995	49,95%
ANEKA BARANG DAN JASA	531.266	29,81%
PAKAIAN, ALAS KAKI, DAN TUTUP KEPALA	75.100	4,21%
BARANG TAHAN LAMA	116.922	6,56%
PAJAK, PUNGUTAN, DAN ASURANSI	149.151	8,37%
KEPERLUAN PESTA DAN UPACARA/KENDURI	19.502	1,09%
TOTAL NON MAKANAN	1.781.936	100,00%

Sumber : BPS, Susenas Maret 2025

<https://jakbar.kota.bps.go.id>

Persentase Penduduk Miskin di Kota Jakarta Barat Tahun 2025

3,91 persen

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kota Jakarta Barat Tahun 2025



Persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Jakarta Barat mengalami penurunan setiap tahun.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - BPS

**KEMISKINAN &
PEMBANGUNAN MANUSIA**

BAB VIII

KEMISKINAN DAN INDIKATOR LAINNYA


Tujuan pembangunan nasional dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dan salah satu dari indikator kesejahteraan umum dalam tujuan pembangunan nasional tersebut adalah dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pembangunan nasional seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, tidak ada perbedaan antar penduduk dan antar wilayah. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya perbedaan tingkat kesejahteraan baik antar penduduk maupun antar wilayah di Indonesia pada umumnya, atau di DKI Jakarta pada khususnya.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keterbandingan tingkat kesejahteraan antar wilayah adalah angka kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan suatu wilayah, semakin rendah tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Selain kemiskinan, rasa aman pun dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Rasa aman dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk dapat beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Semakin aman suatu daerah, diasumsikan semakin sejahtera secara batiniah warganya.

8.1 Kemiskinan

Ada banyak definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh berbagai pihak seperti Bappenas. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep "*basic needs approach*" (pendekatan kebutuhan dasar), dan mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Sebagai permasalahan global, pengurangan penduduk miskin merupakan tujuan bersama negara-negara yang



tergabung dalam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2018 yang menguraikan tujuan global Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN), disebutkan bahwa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun, sebagai tujuan yang pertama.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan suatu konsep kemiskinan yang jelas. Bank Dunia menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan standar kehidupan minimum. Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK). Komponen dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 Kkal per kapita per hari. GKNM setara dengan kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, GK adalah sejumlah uang untuk membeli makanan yang mengandung 2.100 Kkal per hari dan keperluan mendasar bukan makanan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Selain Indonesia, pemakaian konsep 2.100 kilo kalori per hari ini juga digunakan oleh beberapa negara lain seperti Thailand, Vietnam, India, dan beberapa negara berkembang lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam menghitung GK adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) ditambah dengan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Penghitungan yang didasarkan pada hasil survei menyebabkan angka kemiskinan yang dihitung dengan GK hanya bersifat estimasi atau disebut sebagai data makro. Data kemiskinan makro tidak dapat memberikan informasi siapa dan dimana penduduk miskin itu berada. Data kemiskinan makro digunakan untuk pertama, mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, kedua membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah, dan ketiga menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki status kemiskinan mereka. Data kemiskinan makro hanya memberikan informasi angka kemiskinan hingga level kabupaten/kota.


Jumlah penduduk miskin selain dipengaruhi oleh garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Seperti kita ketahui bahwa sebagian dari mereka yang berada di seputaran garis kemiskinan pada umumnya bekerja di sektor informal. Mereka sangat rentan, dapat jatuh ke bawah garis kemiskinan atau naik melampaui garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apabila pertumbuhan ekonomi membaik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka proyek-proyek berjalan dengan lancar dan mereka dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Tetapi apabila ekonomi memburuk dan proyek-proyek tidak berjalan atau terlambat dijalankan maka sebagian dari mereka bisa menjadi tidak bekerja dan menjadi miskin. Inflasi sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah, termasuk di DKI Jakarta.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - BPS, 2021-2025

Gambar 8.1 Tren Kemiskinan di Kota Jakarta Barat dan DKI Jakarta, 2021 – 2025

Berdasarkan Gambar 8.1, perkembangan kemiskinan di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin, meskipun terdapat indikasi perlambatan penurunan pada tahun terakhir pengamatan.



Jumlah penduduk miskin di Kota Jakarta Barat mengalami penurunan dari 502,04 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 464,93 ribu jiwa pada tahun 2024, kemudian relatif stabil pada 464,87 ribu jiwa pada tahun 2025. Pola ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun laju penurunannya mulai melandai pada akhir periode.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Jumlah penduduk miskin tercatat 112,18 ribu jiwa pada tahun 2022, menurun menjadi 106,48 ribu jiwa pada tahun 2024, dan relatif stagnan pada 106,39 ribu jiwa pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian kemiskinan di tingkat provinsi telah mampu menahan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di Kota Jakarta Barat menurun dari 4,22 persen pada tahun 2022 menjadi 3,94 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 3,91 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan perbaikan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan secara konsisten.

Adapun persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dari 4,69 persen pada tahun 2022 menjadi 4,30 persen pada tahun 2024, namun sedikit meningkat menjadi 4,28 persen pada tahun 2025. Kenaikan tipis tersebut mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang perlu mendapat perhatian, meskipun secara umum tingkat kemiskinan masih berada pada tren menurun dibandingkan awal periode.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 sebanyak 106.390 orang setara dengan 3,91 persen dari total penduduk Kota Jakarta Barat, menurun 0,08 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 106.480 orang yang setara dengan 3,94 persen dari total penduduk Kota Jakarta Barat. Walaupun tidak terjadi penurunan yang signifikan, namun angka kemiskinan Kota Jakarta Barat dapat lebih ditekan dibandingkan angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta yang hanya turun 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, perkembangan kemiskinan di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Namun, melambatnya penurunan dan kecenderungan stagnasi pada tahun 2025 menandakan perlunya penguatan

program perlindungan sosial, peningkatan kualitas lapangan kerja, serta pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok rumah tangga rentan, agar penurunan kemiskinan dapat berlanjut secara berkelanjutan.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - BPS, 2021-2025

Gambar 8.2 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Pertumbuhan Garis Kemiskinan di Kota Jakarta Barat, 2021-2025

Sulitnya pemulihan daya beli penduduk akan menyebabkan kesulitan pula bagi penduduk miskin untuk dapat melewati garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kota Jakarta Barat pada tahun 2025 (Gambar 8.2) tercatat sebesar Rp707.669 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,30 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya inflasi perubahan harga, terutama untuk barang-barang yang dikonsumsi penduduk miskin.

8.2 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Jakarta Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Kota Jakarta Barat sudah berada di level

“sangat tinggi” (IPM ≥ 80). Selama 2021–2025, IPM Kota Jakarta Barat rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun. Kondisi ini digambarkan dari IPM tahun 2021 sebesar 82,7 menjadi 85,18 pada tahun 2025. Gambar 8.3 menampilkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jakarta Barat tahun 2021 hingga 2025 secara lengkap.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - BPS, 2021-2025

Gambar 8.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jakarta Barat, 2021–2025

Berdasarkan grafik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Nilai IPM naik dari 82,70 pada tahun 2021 menjadi 85,18 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pembangunan manusia.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 0,88 poin, sejalan dengan proses pemulihan pascapandemi. Pada tahun 2023, pertumbuhan IPM melambat menjadi 0,50 poin, namun kembali meningkat pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar 0,66 poin dan 0,92 poin. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia terus membaik, meskipun laju peningkatannya sempat berfluktuasi.

Tabel 8.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Kota Jakarta Barat, 2020-2025

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Umur Harapan Hidup (UHH)	75,52	75,56	75,62	75,81	75,98	76,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,80	12,81	12,82	12,87	13,14	13,47
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,63	10,78	11,13	11,23	11,24	11,25
Pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rp)	20.468	20.801	21.357	21.709	22.119	22.831
IPM	82,33	82,70	83,43	83,85	84,40	85,18



<https://jakbarkota.bps.go.id>

9

PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Ulasan mengenai berbagai indikator strategis telah disampaikan pada bab-bab yang dibahas pada Publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat tahun 2025. Berbagai gambaran dan perkembangan sosial dan ekonomi menjadi langkah besar dalam mengawal Pembangunan Berkelanjutan Indonesia di masa mendatang.

Demografi


Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 0,31 persen. Tercatat, jumlah penduduk yang mendiami Kota Jakarta Barat tahun 2025 sebesar 2.487,2 ribu jiwa. Komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 50,21 persen dan perempuan sebesar 49,79 persen.

Pendidikan

Secara umum, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk di Kota Jakarta Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. RLS Kota Jakarta Barat tahun 2025 meningkat 0,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jakarta Barat tahun 2025 mampu meningkat sebesar 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Peningkatan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan persentase perubahan HLS Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 2,1 persen.

Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jakarta Barat pada tahun 2025 mencapai 63,71 persen yang mengalami penurunan sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun sebelumnya. TPT yang mengalami penurunan ini menunjukkan indikasi yang baik karena penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi. Kondisi ini juga dicerminkan dari indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Jakarta Barat tahun 2025 yang mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dibandingkan tahun sebelumnya.



Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Kota Jakarta Barat tahun 2025 yang sebesar 2.886 ribu rupiah menunjukkan peningkatan sebesar 5,39 persen. Dari sisi pengeluaran kelompok makanan mengalami peningkatan sebesar 5,19 persen dan non makanan meningkat sebesar 5,52 persen. Namun, jika dilihat dari komposisinya, pengeluaran makanan memiliki komposisi sebesar 38,27 persen dari seluruh total pengeluaran. Adapun, pengeluaran non makanan menunjukkan andil yang lebih besar yaitu mencapai 61,73 persen dari total pengeluaran.

Kemiskinan

Persentase kemiskinan pasca pandemi terus mengalami penurunan di Kota Jakarta Barat. Pada tahun 2020, kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,25 persen kemudian dapat turun menjadi 3,91 persen pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin Kota Jakarta Barat tahun 2025 mencapai 106,39 ribu jiwa jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 110,90 ribu jiwa.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

